

**IMPLEMENTASI PASAL 11 HURUF B PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TUBAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA**

(Studi di Desa Margosuko Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

OLEH:

KRAMAYUDA R.D.P.P

NIM. 145010107111134



KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara mengatur pemerintahannya dengan bentuk berbeda-beda yang sesuai dengan pedoman Falsafah dan Undang-Undang Dasar yang dimiliki oleh negara. Negara Indonesia adalah suatu negara yang menganut Falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI 1945) sebagai pedoman dasar untuk Negara Indonesia, Maka dari itu Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara, yaitu Pancasila dan UUDNRI 1945¹

Dalam pembukaan UUDNRI 1945 dikatakan bahwa² “sebagai salah satu susunan untuk kemerdekaan kebangsaan indonesia di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbentuk suatu susunan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat”. Dalam Pasal 1 ayat (2), UUDNRI 1945 dijelaskan bahwa “*Kedaulatan terletak di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.*” Oleh karena itu bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR), yang merupakan suatu lembaga perwakilan bagi rakyat di Negara Indonesia yang memegang kedaulatan tertinggi.

¹Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine S.T. Kansil, **Sistem Pemerintahan Indonesia**, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2011, Hlm 137.

² *Ibid.*, Hlm 137

Sehubungan dengan Negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi yaitu suatu sistem dimana dalam pelaksanaan dan pengelolaan suatu negara bahwasanya pemegang kekuasaan tertinggi terletak pada rakyatnya. Untuk kebijakan serta peraturan yang di buat berasal dari rakyat. Maka untuk itu aspirasi dari masyarakat berupa ide dan gagasan yang di ajukan oleh masyarakat untuk negara seharusnya menjadi salah satu landasan bagi pemerintah di dalam hal pembangunan atau di dalam suatu kebijakan. Karena aspirasi masyarakat sangatlah penting di dalam pemeritahan yang menganut pada sistem demokrasi.

Karena salah satu contoh dari bentuk pembagian daerah yang ada di indonesia adalah pemerintahan desa, yang dapat dimaksud bahwasanya pemerintah desa diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja.³ Maka dari itu menurut pendapat Sutoro Eko seperti yang di kutip oleh Ni'matul Huda di dalam bukunya yang berjudul Hukum Pemerintahan Desa. *"Desa pada umumnya memiliki suatu pemerintahan sendiri yang di kelola secara otonom tanpa adanya ikatan hierarkis struktural dengan struktur yang lebih tinggi"*⁴ Berdasarkan penafsiran tersebut, bahwasanya desa memiliki pemerintahan sendiri yang tidak terikat secara hierarkis yang memiliki arti bahwa suatu desa tidak terikat secara struktural dibawah pemerintahan daerah kabupaten atau kota, karena desa memiliki otonom

³ Adon Nasrullah Jamaludin, **Sosiologi Perdesaan**, Pustaka Setia, Bandung, 2015, Hlm 109

⁴ Huda. Ni'matul, **Hukum Pemerintah Desa**, Setara pers, Malang, 2015, Hlm 34

untuk mengurus pemerintahannya sendiri berdasarkan dengan kebutuhan desa tersebut.

Adapun pemerintah desa itu dibentuk oleh masyarakat desa dengan cara memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dapat dipercaya mengatur, menata, melayani, memelihara, serta mempertahankan dan melindungi berbagai macam aspek kehidupan masyarakat desa, dengan kehadiran pemerintah desa dapat memenuhi kebutuhan dan eksistensi masyarakat.

Pemerintah desa terdiri dari Kepala desa dan Perangkat desa, Kepala desa di dalam menjalankan tugas-tugasnya di bantu oleh perangkat desa. Adapun kewenangan yang di miliki oleh desa adalah kewenangan tentang pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan untuk masyarakat desa serta pemberdayaan masyarakat yang di prakarsai oleh Badan Permusyawaratan Desa desa agar terciptanya pemerintahan yang mampu menjunjung tentang makna dan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan otonomi yang di miliki oleh desa dalam mengatur daerahnya bertujuan untuk perkembangan kehidupan berbangsa.

Tugas utama pemerintah desa dalam rangka otonomi desa adalah menciptakan suatu kehidupan yang demokratis serta memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat untuk membangun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian dalam desa.⁵ Di dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagai wujud dari penerapan otonomi desa, maka pemerintah pusat secara langsung yang sesuai pada hirarkinya melimpahkan sebagian dari kewenangannya untuk di kelola pemerintah desa. Pada dasarnya kewenangan

⁵Adon Nasrullah Jamaludin, **Sosiologi Perdesaan**, Pustaka Setia, Bandung, 2015, Hlm 185

dapat diartikan sebagai hak atau kekuasaan yang sah untuk bertindak atau melakukan sesuatu.⁶

Otonomi desa adalah hak, wewenang serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan-urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak yang berasal dari suatu nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat agar tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan hak dan kebebasan didalam penyelenggaraan otonomi, maka desa harus berupaya tetap menjunjung nilai-nilai serta tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggaris bawahi bahwa desa adalah suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia. Maka di dalam pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa memiliki tanggung jawab dalam memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tanggung jawab demi terwujudnya kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.⁷

Di dalam melaksanakan dan menyelenggarakan otonomi oleh pemerintah desa, masyarakat atau penduduk desa itu membentuk suatu badan untuk wakil dari masyarakat/penduduk desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut BPD). Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang berperan sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.⁸ pengertian dari Badan Permusyawaratan Desa

⁶Azam Awang, **Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm 49

⁷Adon Nasrullah Jamaludin, **Sosiologi Perdesaan**, Pustaka Setia, Bandung, 2015, Hlm 183

⁸*Ibid.*, Hlm 129

menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 4 adalah “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis⁹.

Sebagaimana juga yang di atur dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.¹⁰

Selanjutnya disebutkan tentang hak BPD di dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 yaitu Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
- c. pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- d. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa¹¹

⁹Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁰Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan desa

Dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki suatu peranan terpenting didalam mengatur serta menata desa bersama pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa, BPD menyusun beberapa progam yang dapat diterapkan di suatu desa. Dengan hadirnya BPD diharapkan mampu menjadi fasilitator dalam memenuhi segala kebutuhan serta pembangunan yang di butuhkan oleh masyarakat. Suatu sistem kerja BPD hampir sama dengan sistem kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) yang ada di tingkat kabupaten atau provinsi, hanya cakupannya saja lebih kecil yang hanya mengatur suatu desa. BPD dituntut juga untuk lebih sensitif terhadap segala aspek fenomena yang terjadi di masyarakat desa, untuk selanjutnya dapat diinformasikan kepada Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan di perdesaan.¹²

BPD adalah suatu lembaga perwujudan dari sistem demokrasi didalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD yaitu berasal dari wakil penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan wakil dari wilayahnya. Anggota BPD yaitu terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Anggota BPD mempunyai masa jabatan yaitu 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali dalam masa jabatan di periode berikutnya. Ketua dan anggota BPD tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan menjadi Perangkat Desa. BPD berfungsi di dalam menetapkan peraturan desa bersama

¹¹Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

¹²Adon Nasrullah Jamaludin, **Sosiologi Perdesaan**, Pustaka Setia, Bandung, 2015, Hlm 129

Kepala Desa di dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.¹³ Penyelenggaraan pemerintahan desa yang ada di desa Margosuko Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, terkait dengan fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih kurang untuk pelaksanaannya.

Peneliti telah melakukan pra survey ke desa Margosuko dan hasilnya adalah banyak dari anggota BPD yang tidak mengetahui tugas dan fungsi dari BPD, masih banyak BPD yang kurang peduli terhadap aspirasi masyarakat dan kurangnya BPD dalam merealisasikan ide, gagasan dari masyarakat seperti halnya pembuatan waduk yang dibutuhkan masyarakat¹⁴, belum adanya pembenahan sarana olahraga,¹⁵ belum mengadakan loka karya, belum terbangunnya rumah aspirasi untuk masyarakat agar dapat menyalurkan aspirasinya yang berbentuk lisan dan tertulis¹⁶, sebenarnya BPD mempunyai efek terpenting di dalam hal pembangunan dan pembinaan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Maka dari itu aspirasi berupa ide dan gagasan masyarakat masih banyak yang belum ditampung dan direalisasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa di karenakan kurang sosialisasi anggota BPD kepada masyarakat terkait fungsi dan tugasnya¹⁷, belum memanfaatkan teknologi informasi di dalam mengayomi dan memberikan informasi kepada masyarakat,¹⁸ belum terlaksananya

¹³*Ibid.*, Hlm 130

¹⁴Hasil wawancara dengan masyarakat desa Margosuko Bapak Gono, pada hari Jumat, 2 Maret 2018 pukul 09.40 WIB

¹⁵Hasil wawancara dengan masyarakat desa Margosuko Bapak Purnomo, pada hari Selasa, 6 Maret 2018 pukul 16.30 WIB

¹⁶Hasil wawancara dengan perangkat desa Margosuko Bapak Murwadi pada hari Rabu, 7 Maret 2018 pukul 11.15 WIB

¹⁷Hasil wawancara dengan perangkat desa Margosuko Bapak Karsani, pada hari Kamis, 15 Maret 2018 pukul 08.00 WIB

¹⁸Hasil wawancara dengan masyarakat desa Margosuko Bapak Rianto, pada hari Sabtu 17 Maret 2018 pukul 15.30 WIB

musyawarah sendiri BPD dengan anggota masyarakat sehingga masyarakat kurang mengerti dan faham tentang tugas pokok BPD dan belum semua masyarakat mengetahui siapa saja anggota BPD nya di desa. selain dari itu banyak permasalahan yang ada dalam mekanisme penyaluran aspirasi yang seharusnya di sampaikan kepada BPD tetapi pada faktanya masyarakat di dalam penyampain aspirasi maupun ide dan gagasan langsung kepada perangkat desa, bahkan untuk anggota BPDpun kurang mengerti akan fungsi dan tugas-tugasnya yang sesuai dengan apa yang telah tertera didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 3 Tahun 2016 tentang fungsi BPD dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa Margosuko yang ada di kecamatan Bancar kabupaten Tuban yang diatur pada Pasal 11 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Terkait dengan Pelaksanaan Pasal 11 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sebelumnya juga sudah dilakukan penelitian dengan tema hampir sama yang membahas tentang Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan hal tersebut peneliti telah mencantumkan penelitian terdahulu agar dapat terlihat jelas dimana letak perbedaannya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sekarang. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga dari orisinalitas penelitian peneliti yang membahas substansi isi dan pembahasan, penelitian sebelumnya lebih fokus kepada peran BPD dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa serta peranan BPD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap sistem pemerintahan desa. Sebagai pembanding

antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu tentang peranan Badan Pemusyawaratan Desa. Berdasarkan hal tersebut peneliti akan mendeskripsikan penelitian sebelumnya kedalam tabel sebagaimana dibawah ini

Tabel 1
Penelitian Sebelumnya

N o	Tah un Pen eliti an	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2015	Nandha Eka Chandra Universitas Brawijaya Malang	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Terhadap Sistem Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang	1.Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap Sistem pemerintahan desa di Desa Genengan Kecamatan	Dalam Penelitian ini bahwasanya peneliti terdahulu lebih fokus membahas tentang fungsi Badan Permasyarakatan Desa kepada sistem pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan desa, sedangkan untuk penelitian yang

			Desa Di Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang	Pakisaji Kabupaten Malang? 2.Apa Faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap sistem pemerintahan desa Di Desa Genengan kecamatan Pakisaji kabupaten Malang?	sekarang lebih mengacu dan fokus kepada bagaimana peran Badan Permasyarakatan Desa dalam penampungan dan penyaluran aspirasi ide serta gagasan yang dimiliki dan perlukan untuk masyarakat serta membahas fungsi dan tugas Badan Permasyarakatan Desa.
2	2017	Muhammad Ishom Kamaludin	Implementasi Pasal 61 Huruf A undang-undang	1.Bagaimana Badan Permasyarakatan	Dalam penelitian ini bahwasanya peneliti terdahulu lebih fokus

		Universitas Brawijaya Malang	nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Dengan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (studi di Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro)	Desa mengimplementas ikan pasal 61 huruf A undang- undang nomor 6 tahun 2014 terkait dengan penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Gajah kecamatan Baureno kabupaten Bojonegoro? 2. Bagaimana langkah-langkah yang seharusnya di lakukan Pemerintah desa bersama Badan	mengkaji Badan permusyawaratan Desa tentang bagaimana penggunaan anggaran dan belanja desa, sedangkan penelitian sekarang lebih mengacu kepada bagaimana peran Badan Permasyarakatan Desa dalam penampungan dan penyaluran aspirasi berupa ide serta gagasan yang di miliki dan diperlukan untuk Masyarakat serta membahas fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa.
--	--	------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				Permusyawaratan desa untuk meningkatkan kompetensi Anggota Badan Permusyawaratan desa Gajah dalam menerapkan pasal 61 huruf A undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa?	
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Perbedaan dengan penelitian yang terdahulu yaitu, untuk peneliti yang pertama menjelaskan bahwasanya BPD lebih fokus membahas tentang fungsi BPD kepada sistem pengawasan di dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan apa saja faktor penghambat dalam melakukan sistem pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa Genengan kecamatan Pakisaji kabupaten Malang, dan juga penelitian ini menggunakan dasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Untuk perbedaan dengan penelitian yang kedua bahwasanya menjelaskan BPD tentang cara bagaimana penggunaan anggaran dan belanja desa serta membahas bagaimana langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh BPD

terhadap penggunaan anggaran dan belanja desa menurut Pasal 61 Huruf A Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang terkait dengan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Perbedaan antara kedua penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan di buat oleh peneliti yaitu, penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti lebih memfokuskan tentang peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta membahas apa saja faktor dan kendala yang di hadapi oleh BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat berdasarkan Pasal 11 Huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Atas dasar itulah peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian terhadap Pasal 11 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dengan judul:

“IMPLEMENTASI PASAL 11 HURUF B PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ” (Studi di Desa Margosuko Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana badan permusyawaratan desa dalam mengimplementasikan Pasal 11 Huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 6 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa terkait dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Margosuko Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban?

2. Apa kendala dan upaya Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengimplementasikan Pasal 11 Huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa terkait dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Margosuko Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa Margosuko dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis kendala dan upaya Badan Permusyawaratan Desa Margosuko dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk menguraikan kegunaan yang terdiri dari manfaat secara teoritis dan praktis dan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai wacana bagi Ilmu Hukum khususnya di bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara tentang Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Pasal 11 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 tahun

2016 dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Margosuko Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban.

b. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk pembelajaran bagi mahasiswa yang lain dan digunakan sebagai referensi untuk peneliti yang akan mengadakan penelitian ataupun digunakan sebagai bahan pembandingan bagi peneliti sebelumnya.

c. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu media pembelajaran agar dapat lebih memperdalam praktik ilmu hukum, khususnya untuk ilmu Hukum Administrasi Negara serta dapat memberikan tambahan wawasan tentang Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Pasal 11 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 tahun 2016 dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa Margosuko Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan beberapa masukan mengenai pengembangan Ilmu Hukum khususnya Ilmu Hukum Administrasi Negara terkait dengan pelaksanaan Pasal 11 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

b. Bagi Mahasiswa.

Penelitian ini diharapkan memberikan sebuah gambaran dan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana penggunaan ataupun pengaplikasian teori, konsep dan proses dalam praktek untuk evaluasi tentang pengetahuan yang telah didapat dalam perkuliahan oleh mahasiswa dengan realitas serta kondisi dan situasi yang ada.

c. Bagi Pemerintah Desa.

Sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan wakil dari masyarakat desa yang terkait tentang kinerja Badan Permasyarakatan Desa berdasarkan Pasal 11 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 tahun 2016 dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dengan harapan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan pembaharuan serta dapat dijadikan sebagai petunjuk bagaimana penerapan yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku bagi masyarakat.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wacana, informasi dan pengetahuan tentang kinerja Badan Permasyarakatan Desa berdasarkan Pasal 11 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 tahun 2016 dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, yaitu mengenai hak masyarakat untuk mengajukan ide, gagasan serta dapat menyalurkan aspirasinya kepada Badan Permasyarakatan Desa.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang berjudul Implementasi Pasal 11 Huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Margosuko Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban terbagi menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Sebagai pendahuluan bab ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Sebagai kajian pustaka bab ini membahas mengenai argumentasi ilmiah yang dipakai sebagai referensi, yang menguraikan tentang Desa dan Pemerintahan Desa, Otonomi Desa serta Badan Permusyawaratan Desa.

BAB III : Metode Penelitian

Sebagai metode penelitian bab ini menguraikan tentang jenis penelitian; pendekatan penelitian; pemilihan lokasi penelitian; jenis dan sumber data; teknik memperoleh data; populasi, sampel dan teknik sampling; teknik analisa data.

BAB IV : Hasil Dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sesuai dengan apa yang telah ditulis dengan menggunakan teknik yang telah dijabarkan dalam metode analisis mengenai Pelaksanaan Pasal 11 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

BAB V : Penutup

Sebagai penutup didalam bab ini yang menguraikan tentang hasil akhir penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Desa Dan Pemerintahan desa

1. Sejarah Desa

Desa di Negara Indonesia pertama kalinya di temukan oleh Mr. Hermawan Warner Muntinghe, seorang yang berasal dari Belanda anggota *road van indie* pada masa penjajahan kolonial inggris, pembantu Gubernur jendral Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di negara Indonesia. Dalam sebuah laporanya tertanggal 14 juli 1817 kepada pemerintah, ia menyebutkan adanya desa-desa di daerah pesisir utara pulau jawa. Pada suatu hari juga di temukan desa-desa di kepulauan luar jawa kurang lebihnya hampir sama dengan desa yang ada di pulau jawa.¹

Desa-desa pun merupakan suatu fenomena yang bersifat *universal* karena hampir memiliki ciri karakteristik yang sama. Desa juga memiliki suatu ciri khusus yang bersifat lokal regional dan juga bersifat nasional. Desa-desa yang ada di indonesia yang memiliki banyak suatu perbedaan dengan desa di negara-negara lain. Desa di indonesia juga memiliki ciri khas antara suatu desa-desa lainnya. Hal ini dapat kita pahami karena negara indonesia memiliki kebhinekaan persatuan dan kesatuan yang cukup kental, sehingga sangat sulit membuat generalisasi karakteristik suatu desa dengan desa-desa yang lainnya².

¹ Adon Nasrullah Jamaludin, **Sosiologi Perdesaan**, Pustaka setia, Bandung, 2015, Hlm 9

² *Ibid.*, Hlm 10

Banyak berbagai macam desa di Indonesia yang dapat terlihat dari beberapa aspek, mulai dari segi fisik maupun segi non fisik. Desa adalah tempat yang digunakan untuk menyatukan masyarakat hukum dalam menjalankan kehidupan dan rumah tangganya masing-masing dengan kewenangannya dan pemerintahannya sendiri, karena desa sudah ada sejak lama dan tetap ada sampai saat ini.

Terbentuknya desa memiliki suatu tujuan yang digunakan untuk peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, secara berdaya guna demi terwujudnya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat yang sesuai dan setara dengan perkembangan serta kemajuan pembangunan yang ada di Indonesia. Adapun syarat terbentuknya suatu desa adalah:³

- a. Minimal penduduk yang harus ada adalah 2500 jiwa, atau setara dengan 500 Kepala keluarga.
- b. Luas wilayah yang dapat dijangkau dengan tujuan untuk pelayanan serta pembinaan masyarakat.
- c. Letaknya memiliki jaringan perhubungan dan komunikasi yang mudah untuk antar dusun.
- d. Tersedianya sarana prasarana perhubungan, pemasaran, sosial dan sarana pemerintahan desa. Adanya kerukunan hidup beragama dalam kehidupan bermasyarakat
- e. Tempat untuk berbagai macam mata pencaharian bagi masyarakat

³*ibid.*, Hlm 15

2. Pengertian Desa

Secara umum yang dimaksud desa adalah gejala yang bersifat *universal*, yang terdapat di seluruh dunia. Desa di ibaratkan sebagai komunitas kecil yang selalu terikat dengan lokalitas tertentu, baik sebagai tempat tinggal maupun untuk memenuhi kebutuhannya, terutama kepada sekelompok masyarakat yang bergantung kepada pertanian. Desa dimana pun memiliki karakteristik tertentu yang cenderung sama.⁴ Secara etimologi kata-kata desa itu berasal dari bahasa sansekerta yaitu *deshi*, yang artinya adalah tanah air atau tanah asal dan dapat disebut juga tanah kelahiran.⁵ Maka dari itu suatu kata desa yang sering kita dengar dan yang kita pahami adalah tempat sebagai sarana berkumpulnya penduduk untuk hidup berdampingan dan bersama dengan menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan serta mengembangkan kehidupan mereka.⁶

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul, dan atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik

⁴Rahardjo, **Pengantar Sosiologi Pedesaan Dan Sosiologi Pertanian**, UGM press, Yogyakarta, 1999, Hlm 28; di dalam buku Adon Nasrullah jamaludin, **Sosiologi Pedesaan**, Pustaka setia, Bandung, 2015, Hlm 5.

⁵Rustiadi dan Pranoto, **Agropolitan: Membangun Ekonomi Pedesaan**, Crestpent Pres, Bogor, 2007, Hlm33 ; ; di dalam buku Adon Nasrullah jamaludin, **Sosiologi Pedesaan**, Pustaka setia, Bandung, 2015, Hlm 4

⁶*Ibid.*, Hlm 4

Indonesia.⁷ Menurut Sutoro Eko, Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa adanya ikatan hierarkis struktural dengan struktural yang lebih tinggi.⁸

Sedangkan menurut R bintaro yang di maksud dengan suatu desa adalah bentuk dari wujud geografis yang di timbulkan oleh unsur-unsur sosial ekonomis, politisi serta kultural yang terdapat suatu pengaruh timbal balik dalam daerah yang lain⁹. Tetapi desa tetap dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian tentang desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah orang yang saling mengenal dengan kehidupan sosial yang saling bergotong-royong, saling membantu serta memiliki adat istiadat yang relative sama dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya ¹⁰ demi terwujudnya kedamaian dalam hidup mereka oleh karena itu masyarakat desa sangatlah harmonis dalam menjalankan kehidupan kesehariannya walaupun sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani. Dari sinilah suatu desa memiliki otonom sendiri yang berbeda dengan daerah otonom yaitu daerah seperti kabupaten, karsidenan, dan provinsi yang memperoleh otonomnya berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah nasional.¹¹

⁷Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495

⁸Menurut sutoro Eko yang dikutip oleh Ni'matulHuda, **Hukum pemerintah Desa**, Setara Press, Malang, 2015, Hlm 34

⁹Nurholis Hanif, **Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa**, Erlangga, Jakarta, 2011, Hlm 2

¹⁰*Ibid.*, Hlm 2

¹¹Mashuri Mashab, **Politik Pemerintah Desa Di Indonesia**, Cetakan 1 Polgov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013, Hlm 3

Pengertian desa secara penafsiran dan definisi menurut para ahli adalah:

- a. Desa menurut Widjaja adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Dengan landasan pemikiran dalam mengenai pemeritahan desa adalah suatu keragaman, suatu partisipasi, otonomi asli, demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat.
- b. Desa menurut Egon E. Bergel menyebutkan bahwa desa selalu berkaitan dengan pertanian dan desa dikenal sebagai pemukiman petani. Dengan demikian suatu faktor pertanian bukanlah satu-satunya ciri yang melekat pada suatu desa.
- c. Desa menurut Koentjaraningrat menjelaskan tentang pengertian komunitas dalam pemilahan ada dua jenis yang dimaksud adalah komunitas besar (seperti kota, negara bagian dan negara) sedangkan untuk komunitas kecil (seperti desa, rukun tetangga dan bagian lainnya). Koentjaraningrat mendefinisikan arti desa adalah suatu "Komunitas kecil yang menetap di suatu tempat".¹²

3. Karakteristik Dan Ciri Desa

Sifat dan karakter suatu desa dapat dilihat secara umum dari alam sekitarnya dan lingkungan hidupnya. Suasana alam dan cuacanya yang sangat cerah, terbentang hamparan sawah-sawah yang menghijau ketika memasuki musim bertanam dan terlihat menguning ketika mulai datangnya musim panen serta terlihat dari kejauhan gunung-gunung yang menjulang tinggi ke langit biru.

Karakteristik desa selalu dikontraskan dengan pemahaman masyarakat tentang pemahaman kota. Dengan arti, desa merupakan suatu gambaran yang masyarakatnya masih bersahaja sangat sederhana dan alami.

¹²Rustiadi dan Pranoto, **Agropolitan: Membangun Ekonomi Perdesaan**, Crespent Pres Bogor, 2007, Hlm 33: di dalam buku Adon Nasrullah Jamaludin, **Sosiologi Perdesaan**, Pustaka Setia, Bandung, 2015, Hlm 4

Pengertian ini sangat berbanding dengan pemahaman masyarakat kota yang sangat maju dan kompleks.¹³

Desa merupakan suatu bentuk dari pengembangan konsep asli dari bangsa Indonesia, meskipun ada sedikit persamaan dengan desa yang ada di india dengan nuansa Hindu. Kehidupan yang ada pada masyarakat desa terikat dengan budaya peninggalan nenek moyang yang sudah diwariskan secara turun-temurun dan memerlukan adaptasi yang sangat panjang dari interaksi intensif, dengan adanya perubahan lingkungan biofisik dari masyarakat. Kearifan lokal merupakan salah satu dari karakteristik masyarakat yang terbentuk melalui proses adaptasi kondusif di kehidupan masyarakat, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami sebagai dasar pembangunan pertanian dan perdesaan.¹⁴ Karena di dalam suatu pembangunan yang akan di kelola dengan otonomi pemerintahan yang baik harus berlandaskan pada prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dimana salah satu prinsip yang di jalankan harus melibatkan masyarakat di dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan. Karena di dalam keterlibatannya mewujudkan pemerintahan yang demokratis, yang mana masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam memberikan ide gagasan agar dapat menyalurkan aspirasinya yang biasanya di dalam suatu pedesaan hal tersebut di dalam penyampainya akan di wakikan melalui dewan permusyawaratan desa untuk pelaksanaan serta mengembangkan aspirasi,ide, dan gagasan yang di ajukan oleh masyarakat. Oleh sebab itu

¹³*Ibid.*, Hlm 18

¹⁴*Ibid.*, Hlm 24

masyarakat dapat menjadi pendukung maupun membantu dan memantau dalam pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan di suatu desa.

4. Sejarah Pemerintahan Desa

Pada tahun 1960 sampai 1 Desember 1979 pemerintah desa di Indonesia diatur oleh perundang-undangan yang di buat oleh para penjajah Belanda. Pada tahun 1965 ditetapkanlah suatu keputusan tentang desa praja yang menggantikan perundang-undangan yang dibuat oleh Belanda yang di sebut *Inlandsche Gemeente Ordonatie* (IGO) dan *Inlandsche Gemeente Buitengewesten* (IGOB) akan tetapi dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1969 tentang suatu pernyataan yang menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang dan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia didalam prakteknya tidak diberlakukan, walaupun secara yuridis undang-undang tersebut masih berlaku hingga terbentuknya undang-undang yang baru yang mengatur tentang pemerintah.¹⁵

Sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, masih diatur dengan :

- a. *Inlandsche Gemeente Ordonatie* yang berlaku hanya di pulau Jawa dan Madura (Staatbland 1936 Nomor 83) *Inlandsche Gemeente Buitengewesten* yang berlaku untuk kepulauan Jawa

¹⁵*Ibid.*, Hlm 112

dan Madura (Staatbland 1938 Nomor 490 junto Staantbland 1938 Nomor 81).

- b. *Indische Staatsregeling* (IS) Pasal 128 yaitu suatu landasan peraturan yang menyatakan wewenang tentang masyarakat desa untuk memilih sendiri kepala desa yang disukai oleh masyarakat menurut dan berdasarkan adat serta kebiasaan setempat.
- c. *Herzein Indonesisch Reglement* (HIR) dan Reglement Indonesia Baru (RIB) yang berisi tentang aturan Hukum Acara Perdata dan Pidana pada Pengadilan-Pengadilan Negeri di Pulau Jawa dan Madura.
- d. Sesudah di nyatakan Kemerdekaan, bahwasanya peraturan-peraturan tersebut pelaksanaanya harus berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 yang sudah di paparkan di Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah serta Keputusan Rembuk Desa.

Maka sebelum dikeluarkanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979, pada hakikatnya tidak ada peraturan pemerintah desa yang seragam dan sama di Indonesia, sepertihalnya peraturan yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Hal seperti ini kurangnya dorongan untuk masyarakat tumbuh berkembang menuju kearah kemajuan yang dinamis, dan dampaknya adalah sulitnya memelihara persatuan dan kesatuan nasional, memelihara integritas nasional dan pembinaan masyarakat yang bersifat terbuka terhadap pembangunan.¹⁶

¹⁶*Ibid*,. Hlm 113

5. Pengertian Dan Wewenang Pemerintah Desa

Pengertian pemerintah desa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah. Pemerintah desa yang menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan untuk masyarakat setempat di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷

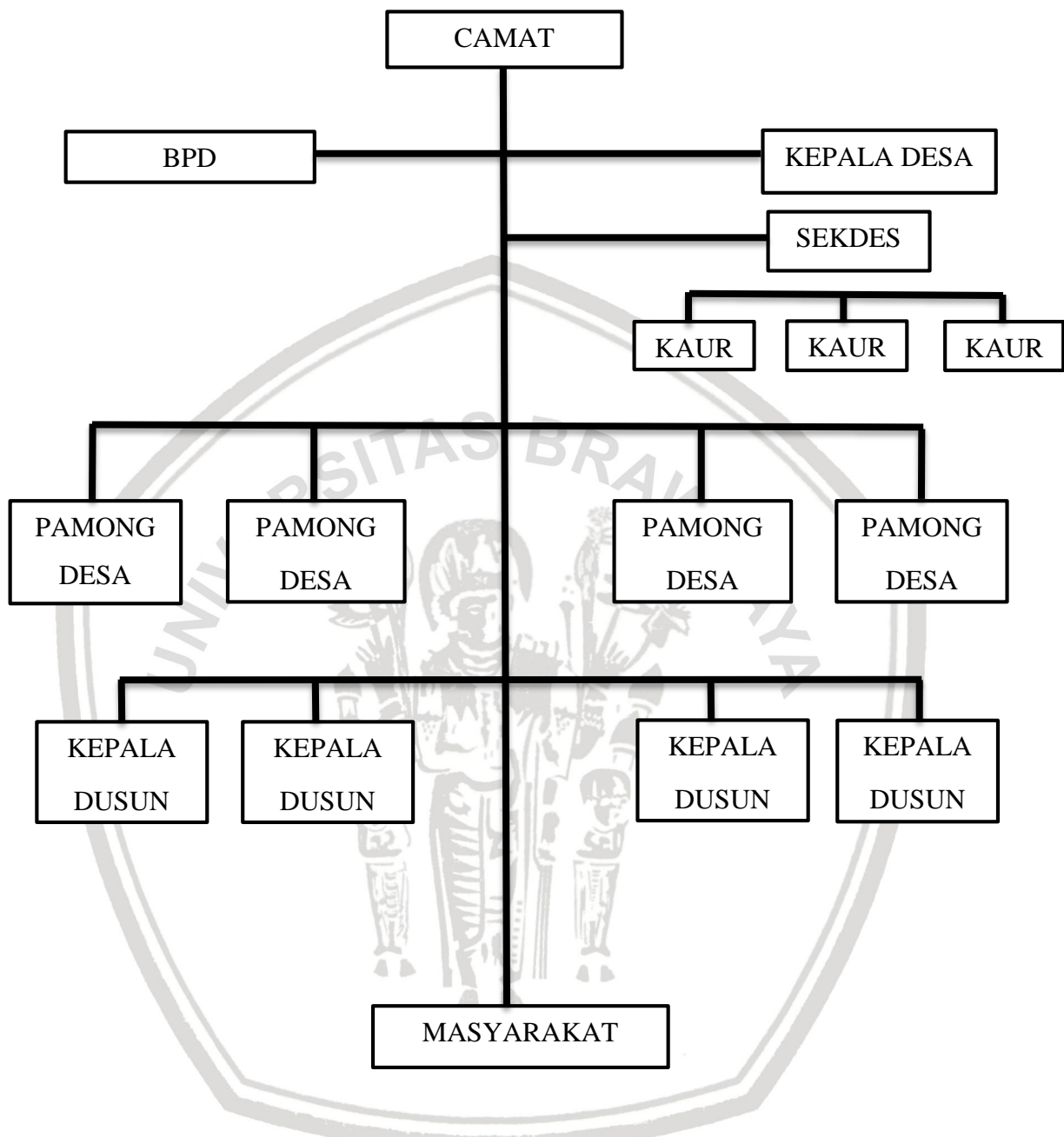
Kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Bab III Pasal 19 yang menyatakan bahwa urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan desa meliputi¹⁸

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang di tugaskan oleh Pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- d. Kewenangan lain yang di tugaskan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

¹⁷Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁸Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

6. Struktur Administratif Pemerintahan Desa



Bagan 1 : Bagan Struktur Administratif Pemerintahan Desa

Sumber : Adon Nasrullah Jamaludin, **Sosiologi Perdesaan**, Pustaka Setia,

Bandung, 2015, hlm 155

Dari bagan yang sudah di jelaskan di atas maka dapat di sebutkan bahwa menurut kerangka badan struktur pemerintah desa terdiri dari :

- a. Camat
- b. Badan Permusyawaratan Desa
- c. Kepala Desa
- d. Sekertaris Desa
- e. Kepala Urusan
- f. Pamong Desa
- g. Kepala Dusun
- h. Masyarakat

Pelaksanaan adalah sebuah proses Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya di sebut BPD) didalam melakukan sebuah kegiatan, dalam hal ini yang bersangkutan di Pasal 11 Huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 yaitu “ *menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa* ” karena pelaksanaan fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak hanya peranan milik BPD saja, tetapi hal ini juga di bantu oleh kepala desa dan lembaga masyarakat yang ada di desa tersebut.

pada hakikatnya fungsi BPD adalah wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dari bermacam pemikiran yang di miliki masyarakat atau sebagai wakil masyarakat untuk mewujudkan desa yang lebih baik, tetapi di dalam hal tersebut banyak faktor-faktor yang mempengaruhi suatu pelaksanaan tugas dan fungsi BPD yaitu :¹⁹

¹⁹Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 8

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan di batasi pada Undang-Undang.
2. Faktor Penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat dimana hukum tersebut di berlakukan dan di terapkan
5. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

B. Kajian Umum Tentang Otonomi Desa

Otonomi desa adalah pemberian ruang gerak bagi desa untuk menjalankan dan mengembangkan prakarsa kewenangan desa dalam berbagai aturan dengan suatu potensi dan budaya lokal yang di milik oleh desa. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan desa menjelaskan tentang daerah otonom adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah yang mengatur dan mengurus pemerintahanya serta kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dari masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰

Maka untuk tugas utama pemerintah dalam otonomi desa adalah menciptakan suatu kehidupan yang demokratis serta memberikan pelayanan kepada publik dan sipil secara cepat serta membangun kepercayaan pada

²⁰*Ibid.*, Hlm 184

masyarakat untuk menuju pada kemandirian desa. Dari situlah desa tidak dikelola secara teknokratis tetapi juga harus memadukan dengan realita dan kemajuan teknologi yang berbasis pada sistem nilai-nilai lokal yang megandung aturan, norma, kaidah serta pranata sosial lainnya.²¹

Dalam bentuk aslinya otonomi desa di tandai dengan ciri ciri sebagai berikut:²²

1. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa adalah pemimpin yang ada di desa, sedangkan pamong desa sebagai pembantu kepala desa di dalam menjalankan tugas-tugasnya.
2. Pemegang kekuasaan tertinggi yang ada di wilayah desa adalah rapat desa yang digunakan dalam penentuan arah suatu kebijakan desa.
3. Suatu lembaga yang ada dalam desa di kembangkan sesuai dengan kebutuhan yang nyata dan riil dengan apa yang dihadapi serta dengan apa yang di perlukan untuk masyarakat desa yang bersangkutan pada konsep kebatinan dan praktik riil beserta problematikanya.
4. Tanah komunal salah satu bentuk cerminan pranata sosial yang memiliki fungsi terpenting dalam pengendalian dan mengawasi perilaku penduduk, masyarakat hukum dalam suatu desa yang bersangkutan.
5. Wajib kerja adalah suatu pranata yang memberikan peranan penting bagi masyarakat seperti gugur gunung, gotong-royong menjadi alat justifikasi sekaligus sebagai alat pelestari sistem otonomi desa.

²¹*Ibid.*, Hlm 185

²²Nurcholis Hanif, **Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**, Erlangga, Jakarta, 2011, Hlm 19

C. Kajian Umum Tentang Badan Permusyawaratan Desa

1. Sejarah Badan Permusyawaratan Desa

Badan Perwakilan Desa yang kita kenal selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut BPD) bukanlah suatu hal yang baru, Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, pada dasarnya Lembaga Musyawarah Desa yang dimaknai sebagai wadah Permusyawaratan/ pemufakatan anggotanya terdiri dari kepala-kepala dusun, pimpinan dari lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan.²³ Lembaga Permusyawaratan Desa dapat dikatakan suatu badan pertama kali yang mempelopori dan melatarbelakangi berdirinya BPD yang di rasa perlu di dirikan dalam suatu pemerintahan desa, tetapi tidak semua di dalam pemerintahan desa menggunakan kata BPD ada juga yang menyebutnya dengan nama lain dengan maksud tujuan sama atas persetujuan desa/wilayah masing-masing. Di aceh semisal, menyebut BPD pada umumnya digunakan pada desa transmigran dan untuk masyarakat aceh sendiri menyebutkan Tuha Peuet Gampong atau Tamiang Majelis Duduk Sekitar.²⁴

Bahwasanya Badan Perwakilan Desa terbentuk sejak adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengubah nama Badan Perwakilan Desa menjadi Badan

²³Pasal 17 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa

²⁴W. Riawan Tjandra dan Ninik Handayani, **Badan Permusyawaratan Desa Dalam Demokrasi Desa**, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, Hlm 2

Permasyarakatan Desa. Dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Badan Permasyarakatan Desa dengan kata lain adalah suatu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa menurut keterwakilan wilayahnya dan ditetapkan secara demokratis.²⁵

2. Pengertian Badan Permasyarakatan Desa

Pengertian Badan Permasyarakatan Desa yang di atur di Pasal 1 angka 4 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2004 tentang Desa, yaitu Badan Permasyarakatan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan rakyat yang di tetapkan secara demokratis.²⁶ Karena Badan Permasyarakatan Desa mempunyai peranan penting dalam suatu masyarakat yaitu menampung dan sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat bersama pemerintah desa yang di pimpin oleh kepala desa, BPD menyusun progam-progam yang dapat di terapkan di pedesaan. Mekanisme kerja BPD hampir menyerupai dengan mekanisme kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) di tingkat kabupaten dan provinsi, hanya cakupanya saja yang lebih kecil.²⁷

Badan Permasyarakatan Desa adalah lembaga perwujudan demokrasi didalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD berasal dari penduduk sekitar desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayahnya. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga,

²⁵*Ibid.*, Hlm 2

²⁶Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa

²⁷Adon Nasrullah Jamaludin, **Sosiologi Perdesaan**, Pustaka setia, Bandung, 2015,Hlm 129

pemuka agama, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Masa jabatan BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/dicalonkan lagi untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak boleh merangkap jabatan menjadi Kepala desa dan perangkat desa²⁸. Di jelaskan juga di dalam Peraturan Daerah Kabupaten tuban tentang BPD yang ingin menjadi perangkat desa mempunyai beberapa syarat yang harus terpenuhi yang ada di dalam pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten tuban Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Calon Perangkat Desa yang berasal dari anggota BPD yaitu :

1. Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat desa, harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD sejak mendaftar sebagai calon Perangkat Desa dan dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
2. Surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmendapat persetujuan Camat atas nama Bupati.
3. Dalam hal BPD mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan kewajibannya digantikan oleh anggota BPD lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan tentang BPD.²⁹

Badan Permusyawaratan Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu lembaga perwakilan rakyat desa salah satu badan penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016.

²⁸*Ibid.*, Hlm 130

²⁹Pasal 8 **Peraturan Daerah Kabupaten Tuban** Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa

3. Urgensi Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa

Tentang Badan Permusyawaratan Desa, suatu kedudukan BPD sudah menggambarkan fungsi dari BPD dan menekankan makna Badan Permusyawaratan Desa atau yang di sebut dengan nama lain yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil berasal dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang di tetapkan secara demokratis.³⁰

Salah satu perwujudan demokrasi didalam penyelenggaraan pemerintahan desa BPD memiliki posisi terpenting dalam sistem pemerintahan desa dan sebagai mitra kepala desa salah satu kedudukan terpenting yang ada pada BPD adalah di perlukanya untuk membahas tentang rancangan peraturan desa bersama kepala desa dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa. Dalam membahas rancangan peraturan desa dengan pemerintah desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD memiliki kedudukan yang sederajat dengan pemerintah desa dalam mengadakan musyawarah dan membuat kesepakatan tentang peraturan desa³¹. Karena pada dasarnya pembentukan BPD didalam suatu desa itu di gunakan sebagai sarana/wadah untuk melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar

³⁰W. Riawan Tjandra dan Ninik Handayani, **Badan Permusyawaratan Desa Dalam Demokrasi Desa**, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, Hlm 4

³¹*Ibid.*, Hlm 4

1945. BPD memiliki kedudukan yang setara dengan kepala desa sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemerintahan desa.³²

Pada hakikatnya BPD sebagai alat penyambung aspirasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, dalam hal ini BPD berarti menjadi alat penyeimbang bagi pemerintahan desa di dalam penyelenggaraanya.³³ Maka syarat untuk dapat menjadi calon anggota BPD yang di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah.
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa.
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
- h. persyaratan Administratif lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.³⁴

³²*Ibid.*, Hlm 5

³³*Ibid.*, Hlm 6

³⁴Pasal 4 **Peraturan Daerah Kabupaten Tuban** Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Dengan adanya syarat-syarat yang di atur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa maka dapat terlihat bahwasanya BPD mempunyai fungsi yang harus di selenggarakan demi terciptanya pemerintahan desa yang baik yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.³⁵

Didalam kegiatan Pertanggungjawaban yang di miliki oleh BPD, maka mereka harus tetap menjaga kualitas dan kuantitas kinerjanya, dengan cara menjalankan kinerjanya yang sesuai berdasarkan beban kerja menurut ketentuan yang telah di tetapkan untuk BPD. Oleh sebab itu dapat kita simpulkan dengan apa yang telah di terangkan dalam kajian tentang peran BPD, bahwasanya BPD sangatlah penting sebagai penyalur dari suatu permasalahan dan keluhan serta aspirasi dari masyarakat untuk membangun suatu desa dengan sistem pemerintahan yang baik dengan otonominya sendiri.

³⁵Pasal 11 **Peraturan Daerah Kabupaten Tuban** Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah berlandaskan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari, memahami dari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya, dengan itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta yang terjadi di dalam hukum tersebut dan kemudian mengusahakan pemecahan atas suatu permasalahan-permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.¹

Jenis penelitian yang di gunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan jenis yuridis empiris, yaitu meneliti bagaimana pelaksanaan dan penerapan hukum di dalam masyarakat dengan cara menganalisis pasal 11 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di desa Margosuko Kabupaten Tuban. Penelitian dengan metode yuridis empiris ini adalah Suatu penelitian yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan selanjutnya meneliti dengan data primer dengan kenyataan apa yang telah terjadi di lapangan dan masyarakat.²

¹Soerjono Soekanto, **Pengantar penelitian Hukum**, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2010, Hlm 42.

²*Ibid.*, Hlm 42

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah suatu pendekatan yuridis sosiologis, yaitu sebuah bentuk penelitian yang dimana bentuk dari penelitian ini dilakukan secara langsung dari cara terjun secara nyata dalam keadaan masyarakat dan lingkungan bertujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*) secara langsung, dan dilanjutkan pada identifikasi permasalahan (*problem-indentification*) yang kemudian berujung pada tahap akhir yaitu pada cara penyelesaian permasalahan (*problem-solution*)³. Peneliti menggunakan pendekatan dengan metode yuridis sosiologis karena peneliti menganalisis tentang penerapan peraturan yang berlaku pada desa Margosuko kecamatan Bancar yang berada di kabupaten Tuban yang dihubungkan dengan suatu desa tersebut berkaitan dengan Pasal 11 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 3 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dengan tujuan menganalisis dan menemukan kendala serta upaya dalam mengatasi permasalahan terkait penampungan serta penyaluran aspirasi masyarakat desa.

C. Pemilihan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Margosuko Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, Alasan pemilihan lokasi dalam penelitian ini berdasarkan atas latar belakang permasalahan hukum di dalamnya, didalam penelitian yang ditemukan penulis pada saat pra riset di Desa Margosuko Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban terkait penerapan Pasal 11 huruf b Peraturan

³*Ibid.*, Hlm 10

Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dimana dalam peraturan tersebut masyarakat berhak mengutarakan ide serta menyalurkan aspirasinya kepada BPD dan BPD menampung aspirasi masyarakat, tetapi pada faktanya bahwa kinerja BPD dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa masih kurang baik. masyarakat desa cenderung menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Kepala Desa ataupun pada aparat desa, tidak melalui BPD dan dalam penyaluran aspirasi masih ada sebagian dari masyarakat yang belum dapat mengutarakan ide, gagasan dan aspirasinya kepada BPD serta ada juga dari beberapa masyarakat belum mengetahui siapa saja anggota BPD, bahkan anggota BPD tidak tau fungsi dan tugas-tugasnya untuk masyarakat sebagai anggota BPD . Padahal salah satu fungsi terpenting dari BPD itu sendiri adalah menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat dan sebagai sarana perwakilan dari penyampaiaan keluhan kesah masyarakat apa yang di alami dan terjadi di dalam desa Margosuko sehingga dengan permasalahan tersebut peneliti memilih dan mengambil lokasi di tempat ini.

D. Jenis data dan Sumber data

1. Jenis data

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Pengumpulan data primer adalah pengumpulan data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri dengan cara terjun di lapangan⁴. berupa informasi pengalaman serta pendapat yang berasal dari sumber-sumber hasil wawancara dengan narasumber di tempat penelitian tersebut, dengan sumber utama adalah masyarakat desa, pemerintah desa, serta anggota badan permusyawaratan desa⁵ Margosuko Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban.

b. Data sekunder

pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka yang dapat dilihat dari nilai dan norma terhadap permasalahan tersebut mengenai tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa. Tentang data sekunder mencakup dokumen dokumen resmi, buku buku serta hasil penelitian yang lainnya dan sudah berwujud laporan dan lain lain⁶.

2. Sumber data

Pada penelitian ini jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini diperoleh dari hasil wawancara bebas terpimpin yang berasal dari subyek penelitian yaitu Badan Permusyawaratan Desa Margosuko. Alasan peneliti menggunakan metode wawancara untuk

⁴Imam Koeswahyono, dkk., **Sosiologi Legal Bekal Pengantar Dan Subtansi Pedalaman**, Intimedia, Malang, 2014, Hlm 113

⁵Soerjono Soekanto, **Pengantar penelitian Hukum**, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2010, Hlm 12

⁶*Ibid.*, Hlm 12

memperoleh informasi dari beberapa hal-hal yang tidak diperoleh dari wawancara.⁷

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder ini yang menjelaskan bahwa bahan hukum primer terdiri dari literatur ilmu hukum dan karya ilmiah beserta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di bahas yaitu tentang bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

E. Teknik Memperoleh Data

Di dalam memperoleh data tersebut, peneliti menggunakan teknik memperoleh data dengan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sering di gunakan oleh penulis dimana penelitian hukum yang di lakukan adalah jenis penelitian yuridis empiris.

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad “wawancara merupakan kegiatan melakukan tanya jawab secara langsung antara peniliti dengan responden atau narasumber dan informan demi mendapatkan suatu informasi terkait.”⁸

Wawancara yang di lakukan oleh peneliti tidak hanya sekedar wawancara dengan bertanya saja, melainkan pertanyaan yang di tanyakan sudah di

⁷Burhan Ashofia, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, jakarta,2010, Hlm 59

⁸Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, jakarta,2006,Hlm 161

persiapkan dan di susun sedemikian rupa agar memperoleh sebuah jawaban relevan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang di angkat oleh peneliti.

Wawancara tersebut akan di lakukan kepada:

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa
3. Masyarakat Desa

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara menganalisa terhadap bahan-bahan yang berasal dari sumber data, mencari data yang di lakukan dengan cara membaca, mencatat dan mempelajari bahan hukum primer yang berasal dari perundang-undangan, buku literatur hukum pemerintahan desa yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

F. Populasi,Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, tumbuhan, hewan, gejala-gejala dari peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu dalam suatu penelitian⁹. Populasi atau *universe* adalah sejumlah golongan dari manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri karakteristik yang sama.¹⁰

⁹Hadari Nawawi, **Metode Penelitian Bidang Sosial**. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, Hlm 150

¹⁰Soerjono Soekanto, **Pengantar penelitian Hukum**, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2010, Hlm 172

Dalam penelitian ini adalah populasi masyarakat desa Margosuko yang terletak di kecamatan Bancar kabupaten Tuban karena peneliti melakukan studi di kabupaten Tuban.

2. Sample

Sample adalah bagian himpunan dari suatu Populasi¹¹ yang biasanya digunakan untuk mempermudah peneliti dalam penelitiannya karena tidak perlu meneliti semua populasi, tetapi hanya meneliti sebagian dari populasi. Adapun peneliti menggunakan cara wawancara yang benar-benar dilakukan dengan sedemikian rupa yang menggambarkan suatu populasi maka responden yang telah di wawancarai yaitu:

1. Kepada Kepala Desa Margosuko adalah Ibu Ispilin .S.E
2. Kepada Pemerintah Desa Margosuko antara lain:
 - a. Sekdes Ibu Eko Setyowati
 - b. Kepala Urusan Keuangan Bapak Murwadi
 - c. Kepala Urusan Umum dan TU Bapak Jait
 - d. Kepala Urusan Perencanaan Bapak Karsani
 - e. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Bapak Ahmad kasdari
 - f. Kepala Seksi Pemberdayaan Rakyat Bapak Abdul wahab
 - g. Kepala Seksi Pelayanan Rakyat Bapak Muhammad Ghofur
 - h. Kepala Dusun Mamer Bapak Santoso
 - i. Kepala Dusun Sruki Bapak Lunda H.R.
 - j. Kepala Dusun Jegong Bapak Suyono

¹¹Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, Hlm 119

k. Kepala Dusun Kandang Bapak Didik Irwanto

3. Kepada Badan Permusyawaratan Desa Margosuko antara lain:

- a. Ketua BPD Bapak Heryanto S.P.D.I
- b. Anggota BPD Bapak Tamat
- c. Anggota BPD Bapak Suyanto
- d. Anggota BPD Bapak Mu'allim
- e. Anggota BPD Bapak Syamsul
- f. Anggota BPD Bapak Kasturi

4. Kepada Anggota Masyarakat Desa Margosuko antara lain:

- a. Bapak Rianto di Dusun sruki
- b. Bapak Kabul di Dusun Sruki
- c. Bapak Karimul Abdi di Dusun Sruki
- d. Bapak Kosmen di Dusun Mamer
- e. Saudara Wito di Dusun Mamer
- f. Bapak Burno di Dusun Mamer
- g. Bapak Slamet di Dusun Kandang
- h. Bapak Purnomo di Dusun Kandang
- i. Ibu Imah Mahmudah di Dusun Kandang
- j. Bapak Fuad Hasim di Dusun Jegong
- k. Saudara Udin di Dusun Jegong
- l. Ibu yulawati di Dusun Jegong
- m. Saudara Warmu di Dusun Jegong

3. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah teknik yang dipergunakan dalam pengambilan sample, pada penelitian ini peneliti menggunakan *purposive sampling* (sample bertujuan). Yaitu teknik perolehan data yang memilih sample berdasarkan penilaian tertentu karena sebagai suatu unit atau unsur yang di pilih di anggap sudah dapat mewakili populasi¹²

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menelaah seluruh data yang ada dari berbagai macam sumber yang telah di dapat dengan cara wawancara serta pengamatan yang terjadi di lapangan yang sudah di uraikan dalam bentuk catatan dan dokumen pribadi. Tentang pola pikir kualitatif yang dimaksud adalah sekedar untuk mengecek dan melaporkan segala sesuatu yang terjadi di lapangan atau di tempat peneliti yang dilakukan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguraikan data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 11 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 3 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Setelah dilakukan analisis dari suatu permasalahan yang ada dan dapat terpecahkan, maka dapat di tarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang telah diteliti.

¹²Imam Koeswahyono, dkk., **Sosiologi Legal Bekal Pengantar Dan Subtansi Pedalaman**, Intimedia, Malang, 2014, Hlm 113

H. Definisi Operational

Definisi operasional penelitian ini yaitu penjelasan mengenai batasan dari beberapa istilah. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi yang di maksud disini adalah pelaksanaan dan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa Margosuko kecamatan Bancar kabupaten Tuban.

2. Sistem pemerintahan desa

Suatu sistem yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan suatu kesatuan pemerintahan yang menjalankan urusan pemerintahan desa yang memiliki suatu kewenangan menjalankan pemerintahan sesuai dengan otonom yang tetap menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban yang berlaku.

3. Aspirasi masyarakat

Salah satu program pemerintah desa dalam mewujudkan sistem demokrasi yang menganut pada prinsip good governace yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan dan proses kemajuan desa. Sasaran dalam hal penampungan aspirasi masyarakat ini untuk mencakup semua bidang, mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, dan pendidikan.

4. Badan Permusyawaratan Desa

Salah satu Badan penyelenggaraan pemerintah Desa dan lembaga yang melaksanakan tugas kewenangan, beserta fungsinya dalam sistem pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk-penduduk desa yang di tetapkan secara demokratis melalui musyawarah desa.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Asal-Usul Desa Margosuko

Berdasarkan sejarah yang berasal dari masyarakat desa Margosuko di ceritakan tentang asal-usul adanya Desa Margosuko sebagaimana yaitu cerita dan kenangan dari nenek moyang yang tertuang didalam dongeng-dongeng dan di wariskan secara turun-temurun serta di sampaikan secara langsung dari mulut-kemulut sehingga bagaimana terwujudnya sebuah desa tersebut. Menurut cerita tentang sejarah Desa Margosuko yang paling populer pada pertengahan abad ke 18 yaitu dimana abad paska perang saudara yakni dinamai dengan *Perang Pajang*, yaitu perang besar di atas tanah jawa yang prakarsai oleh para bangsawan serta kesultanan pajang dan para prajurit-prajuritnya. Pada akhirnya setelah terjadinya peperangan tersebut dengan berbagai macam tragedi didalam peperangan dan banyak juga kematian yang ada di dalam Perang Pajang, maka sebagian dari bangsawan kesultanan dan para prajuritnya melarikan diri dari kerajaan untuk penyelamatan diri dari ancaman yang terjadi didalam peperangan yaitu kematian yang di sebabkan oleh perang saudara tersebut.¹

Maka sebagian dari para bangsawan dan sultan-sultan beserta para prajuritnya setelah melarikan diri dan bersembunyi di suatu wilayah yang berada di daerah Tuban, di sela-sela perjalanan dengan sisa-sisa kekuatan

¹<http://www.margosuko-bancar.desa.id>

dalam pelariannya para bangsawan dan sultan beserta prajuritnya mencari tempat peristirahatan yang aman untuk tempat persembunyiannya dan pada akhirnya setelah mendapatkan wilayah di daerah Tuban dan berada di suatu desa tersebut, persembunyian di nyatakan aman. Dengan berjalannya hari demi hari para bangsawan dengan sisa prajuritnya membangun sebuah tempat singgah/peristirahatan dengan segala upaya membentuk wilayah tersebut menjadi tempat dimana para bangsawan dan prajuritnya hidup, untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara membuat sumur-sumur di berbagai wilayah desa tersebut dan menanam sebuah bunga yang dinamakan bunga *SOKO*. Setelah para bangsawan dengan prajuritnya tinggal di desa dengan beberapa lamanya. Maka untuk mengenang daerah yang telah di huni semasa persembunyian setelah terjadinya perang Pajang, pada akhirnya para bangsawan untuk mengenang petilasan yang telah di huni, maka para bangsawan menamai tempat tersebut menjadi desa **MARGOSUKO**.

2. Kondisi Geografis Desa Margosuko

Secara geografis Desa Margosuko terletak pada posisi 115°7'20" Lintang Selatan dan 8°7'10" Bujur Timur. Topografi untuk ketinggian desa ini adalah berupa dataran sedang yaitu sekitar 250 M diatas permukaan air laut. Berdasarkan data Monografi tahun 2018, Desa Margosuko mempunyai luas wilayah seluas 186,193 Ha merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban.² Secara administratif wilayah Desa Margosuko berbatasan dengan wilayah lain yaitu sebagai berikut :

²<http://www.margosuko-bancar.desa.id>

Tabel 4.1

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Kelurahan Bancar	Bancar
Sebelah Selatan	Ds. Sidomulyo	Bancar
Sebelah Timur	Ds. Cingklung	Bancar
Sebelah Barat	Ds. Ngampelrejo	Bancar
	& Kelurahan Bancar	Bancar

Data Sekunder. Buku Profil Desa Margosuko Tahun 2018

Desa Margosuko terletak pada bagian di wilayah ujung timur Kecamatan Bancar yang berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tambakboyo bagian barat.

3. Keadaan Demografi Desa Margosuko

Penduduk Desa Margosuko berdasarkan data yang di peroleh di kantor Desa Margosuko pada tahun 2018 secara keseluruhan berjumlah 2.672 orang yang terdiri dari 1.299 penduduk Laki-Laki dan 1.373 penduduk Perempuan yang seluruhnya adalah warga Negara Indonesia.

Dengan jumlah penduduk 2.672 bahwasanya budaya masyarakat tidak banyak yang berubah dari zaman ke zaman dan masih memegang teguh dan menerapkan budaya-budaya nenek moyangnya yang sudah di lakukan secara turun-temurun oleh masyarakat desa, seperti halnya bersih desa, gotong royong, acara maulid nabi, acara tujuh belasan, hingga musyawarah

mufakatpun masih di lakukan di Desa Margosuko demi tujuan untuk mempererat tali silaturahmi sesama warga desa.

4. Gambaran Masyarakat Desa Margosuko

Masyarakat Desa Margosuko yang memiliki jumlah Penduduk 2.672 jiwa rata-rata tingkat pendidikanya hanya sampai dengan tingkat sekolah dasar, bahkan masih banyak yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Untuk melihat lebih lanjut akan di paparkan pada tabel berikut :

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Lulusan Sekolah Dasar	1003 Orang
2	Lulusan SMP/ SLTP	511 Orang
3	Lulusan SMA/SLTA	262 Orang
4	Lulusan Akademi / D1-D3	9 Orang
5	Lulusan Sarjana S1-S3	47 Orang
6	Tidak Tamat SD / Tidak Sekolah	425 Orang

Data Sekunder, Buku Profil Desa Margosuko 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Margosuko berpendidikan hanya tamat sekolah dasar saja, hingga mencapai 1003 Orang, sedangkan yang tamat SLTP/ sederajat mencapai 511 Orang, yang tamat ke pendidikan SLTA/ sederajat sebanyak 262 Orang saja,

dan yang melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi melalui pendidikan diplomas dan sarjana sebanyak 56 Orang saja sedangkan sebanyak 425 Orang tidak tamat SD dan tidak bersekolah.

Masyarakat Desa Margosuko dapat menyadari bahwa pendidikan adalah yang harus di utamakan, tetapi sebagian dari mereka hanya memilih menyekolahkan anak-anaknya dengan batas dan kemampuan perekonomiannya saja. Bahkan banyak juga dari warga masyarakat Desa Margosuko yang ingin menyekolahkan anak-anaknya sampai kejenjang yang lebih tinggi seperti SLTA atau ketingkat yang lebih tinggi sampai mendapatkan gelar sarjana. Tetapi sangat di sayangkan untuk kesadaran atas pendidikan warga Desa Margosuko khususnya para pemuda-pemuda banyak yang memilih untuk langsung bekerja dan tidak meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi setelah mereka lulus SMA/sederajat. Bahkan bagi kaum wanita lebih memilih untuk menikah atau langsung kerja guna untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari dari pada harus melanjutkan pendidikan formal.

5. Unsur-Unsur Pemerintahan Desa Margosuko

Desa Margosuko Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban dengan pemerintahan desa yang di miliki yaitu Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa, terdiri dari Sekertaris Desa, Pelaksanaan Kewilayahan (Kepala Dusun) dan Pelaksanaan teknis (Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat) yang bertugas untuk penyelenggaraan urusan

pemerintahan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang dapat dijelaskan untuk struktur organisasi pemerintah desa sebagai berikut :

a. Kepala Desa Margosuko

Kepala desa adalah sebagai pemimpin desa yang bertugas sebagai pemegang kendali untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa dan melakukan pembinaan serta pemberdayaan bagi masyarakat. Maka tugas dan kewenangan Kepala Desa sebagai pemimpin dalam suatu wilayah pedesaan yang di jelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2015 Tentang

Kepala Desa yang berwenang untuk :

- a. *memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa*
- b. *mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa*
- c. *memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa*
- d. *menetapkan Peraturan Desa*
- e. *menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*
- f. *membina kehidupan masyarakat Desa*
- g. *membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa*
- h. *membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa*
- i. *mengembangkan sumber pendapatan Desa*
- j. *mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa*
- k. *mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa*

- l. memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

b. Perangkat Desa Margosuko

Perangkat Desa merupakan salah satu perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Perwujudan yang dapat dikatakan sebagai Perangkat Desa adalah Sekertaris Desa, Pelaksanaan kewilayahan, Pelaksanaan Teknis.⁴ Tugas dari perangkat desa adalah membantu Kepala Desa untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Sekretariat sebagai salah satu unsur pelayanan desa, unsur pelaksanaan teknis dan unsur pelaksanaan kewilayahan pada dasarnya sekertaris adalah staf pembantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya serta membawahi sekretariat yang ada di desa Margosuko.

1. Sekretariat desa adalah salah satu bagian yang mempunyai tugas untuk menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di desa serta memberikan pelayanan administrasi. Dalam menjalankan tugasnya sekeretaris desa terbagi menjadi 3 bagian sesuai dengan perkembangan desa Margosuko yaitu :

- a) Kepala urusan tata usaha dan umum

³Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa

⁴Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa

- b) Kepala urusan keuangan
- c) Kepala urusan perencanaan

2. Pelaksanaan wilayah adalah bagian yang mempunyai tugas untuk membantu kepala desa dalam urusan kewilayahan yang dimaksud adalah kepala dusun yang terbagi menjadi 4 dusun yang ada di desa Margosuko yaitu :

- a) Kepala dusun sruki
- b) Kepala dusun jegong
- c) Kepala dusun kandang
- d) Kepala dusun mamer

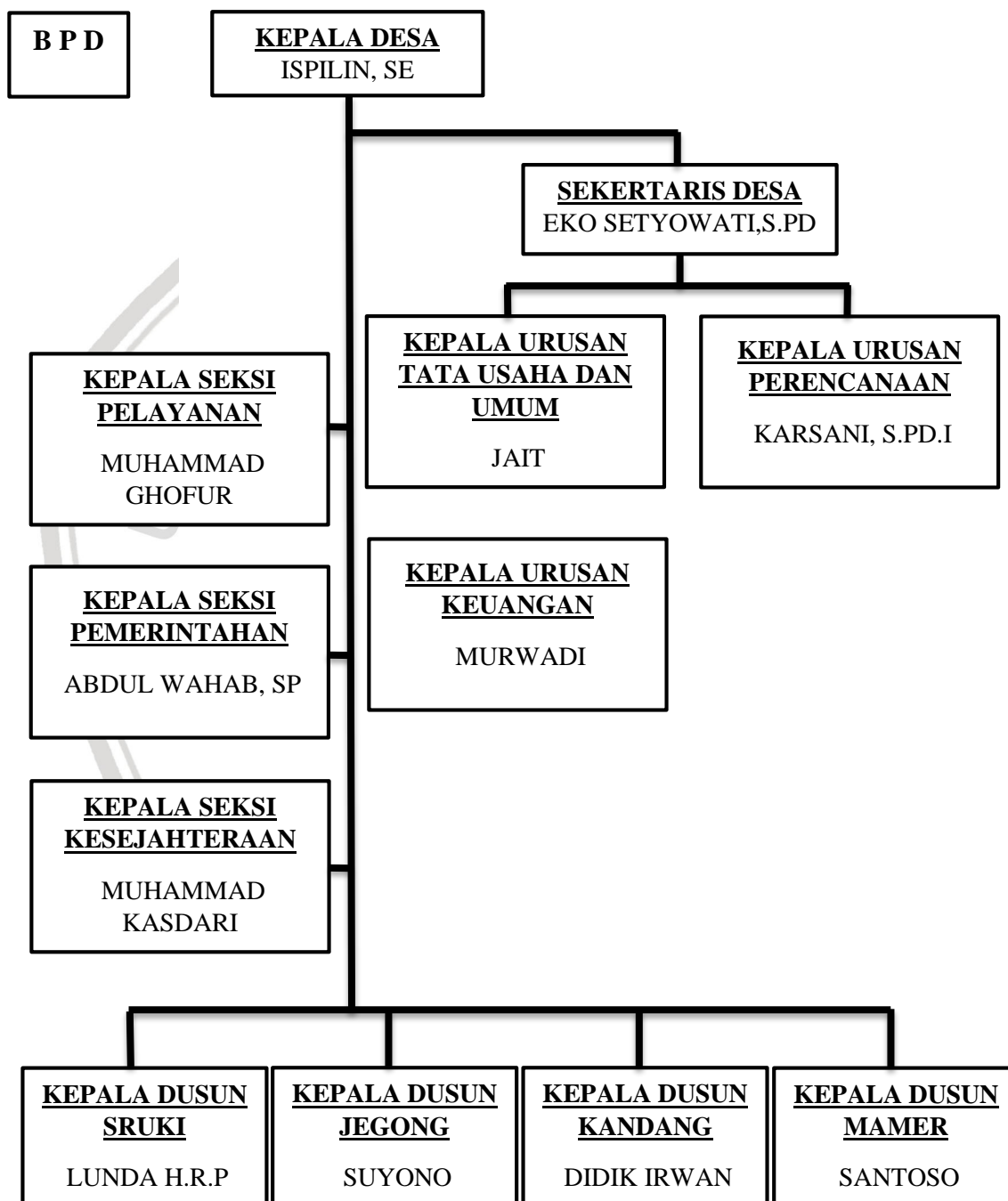
3. Pelaksanaan teknis adalah bagian yang mempunyai tugas untuk membantu kepala desa bagian teknis operational. Dalam menjalankan tugasnya pelaksana teknis operational desa terbagi menjadi 3 bagian sesuai dengan perkembangan desa Margosuko yaitu :

- a) Kepala seksi pelayanan
- b) Kepala seksi pemerintahan
- c) Kepala seksi kesejahteraan

Maka dari masing-masing perangkat desa yang sudah di jelaskan diatas harus menjalankan dengan tujuan membantu tugas dan kewenangan kepala desa sebagai sarana pemberdayaan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat desa. Berikut adalah struktur organisasi pemerintah desa Margosuko :

Bagan 4.1

Susunan Pemerintah Desa Margosuko Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban



Data Sekunder, Buku profil Desa Margosuko Tahun 2018

c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi seperti yang di atur dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang berbunyi:

Badan permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan.
- c. melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.⁵

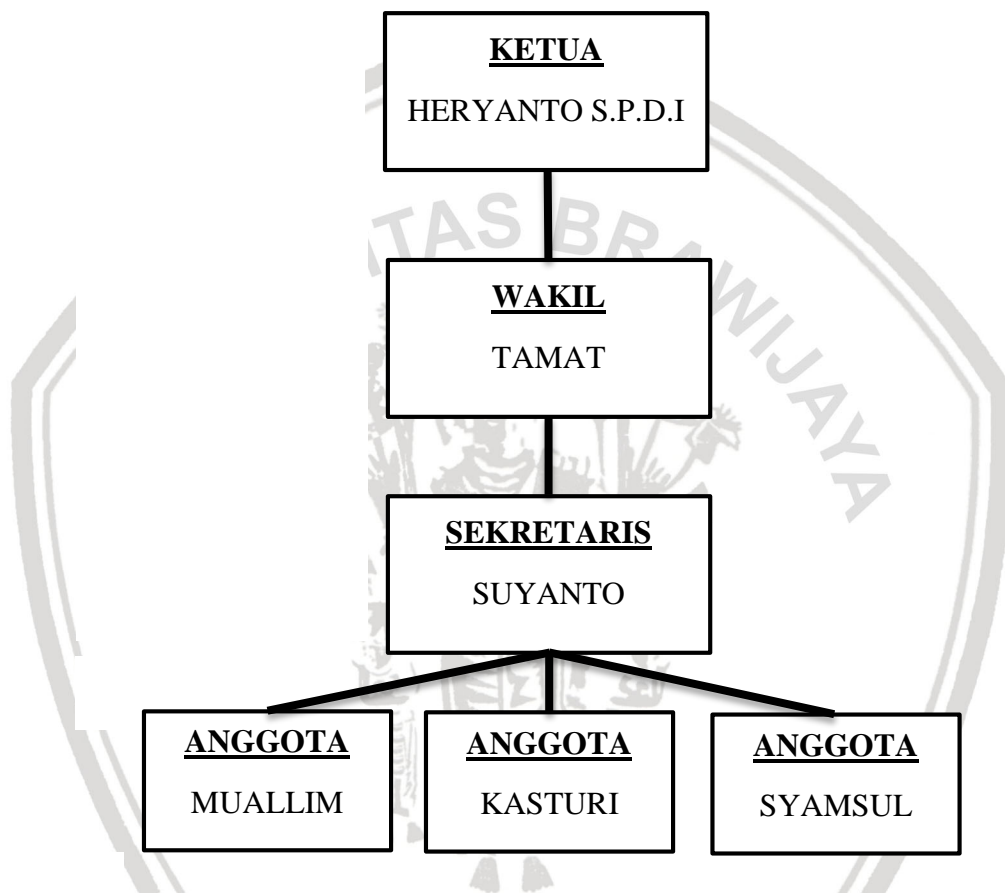
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayahnya yang ditetapkan secara demokratis, dari kesimpulan yang dapat kita ambil bahwasanya Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peranan sebagai wakil dari suara rakyat antara pemerintah desa Margosuko dengan Masyarakatnya.⁶ Badan Permusyawaratan Desa terbentuk dengan struktur organisasi yang terdiri dari ketua dan anggota demi mempermudah didalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang akan di uraikan dalam struktur organisasi sebagai bagan berikut :

⁵Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

⁶Hasil Wawancara Lunda Hadi rusli Kadus Desa Margosuko, 19 Juni 2018

Bagan 4.2

Susunan struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Margosuko
Tahun 2018



Data Sekunder, Buku profil Desa Margosuko Tahun 2018

Diatas adalah struktur Badan Permusyawaratan Desa yang ada di desa Margosuko, Karena sama-sama dipilih oleh rakyat untuk mengemban amanah dari masyarakat desa. Maka sebagai wujud wakil dari masyarakat Badan Permusyawaratan Desa harus mejadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa yang harus memberikan kontribusi demi kepentingan

bersama dengan tujuan untuk mengutarakan aspirasi dan sebagai penyalur aspirasi masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

B. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengimplementasikan Pasal 11 Huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Pemerintah Desa Margosuko dalam suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan harus berusaha dengan cara menerapkan seluruh peraturan-peraturan yang berkaitan tentang kesejahteraan yang bertujuan untuk kemakmuran masyarakat desa, meliputi dari berbagai bentuk aturan-aturan yang di buat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan bahkan oleh pemerintah desa demi terwujudnya pembangunan demi pembangunan sebagai wujud untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya dengan peraturan daerah yang mengatur tentang badan permusyawaratan desa.

Pemerintah desa didalam upaya meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat salah satunya harus bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut dengan BPD). Bentuk kerjasama antara BPD dan pemerintah desa salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan desa yang dapat dilihat berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang berbunyi:

Badan permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan.

c. melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.⁷

Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa bentuk dan macam asas dengan tujuan agar peraturan-peraturan tersebut mempunyai dampak yang positif serta dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu fungsi dari BPD berdasarkan Pasal 11 Huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah *“menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa”*. Secara umum pelaksanaan dari fungsi BPD didalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa di Desa Margosuko masih kurang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, peneliti melakukan wawancara dengan pemerintah desa, perangkat desa serta dari beberapa masyarakat di wilayah Desa Margosuko yang rata-rata menyatakan bahwa penyerapan/penampungan dan cara pelaksanaan aspirasi yang di sampaikan dari masyarakat kepada BPD masih sangatlah kurang, artinya bahwa masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tugas dan fungsi BPD serta bagaimana cara penyampaian aspirasi kepada BPD. Selanjutnya peneliti telah menganalisis satu per satu mengenai pelaksanaan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dengan menggunakan teori efektivitas hukum sebagai berikut:

1. Faktor peraturannya
2. Faktor perangkat desa
3. Faktor sarana atau fasilitas

⁷Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

4. Faktor masyarakat/kebudayaan

Berikut ini beberapa uraian dari penjelasan teori yang digunakan peneliti untuk meneliti kurangnya peran BPD dalam pelaksanaan dengan kondisi di lapangan yang telah dilakukan survey oleh peneliti:

1. Faktor Peraturannya

Ditinjau dari faktor peraturannya yang mempunyai makna bahwa peraturan dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh para penguasa pusat maupun daerah yang sah.⁸ Berkaitan dengan penjelasan yang tertulis diatas bahwa fungsi BPD dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat diatur dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Bahwansanya mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat melalui BPD dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis.

Untuk penyampaian aspirasi secara lisan bisa dilakukan melalui forum dengar pendapat, pengaduan langsung kepada BPD, usulan lisan, aspirasi secara lisan pada saat diadakan kunjungan kerja, komunikasi melalui sarana informasi yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat kepada BPD.⁹

Maka dari itu bahwasanya penyampaian aspirasi dapat di sampaikan secara lisan dan dapat di sampaikan melalui sarana surat pengaduan, usulan tertulis, surat elektronik, atau dapat melalui formulir resmi yang disediakan di sekretariat BPD. Pada tahap selanjutnya peneliti melakukan penelitian

⁸Soerjono Soekanto, **Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 11

⁹W. Riawan Tjandra dan Ninik Handayani, **Badan Permusyawaratan Desa Dalam Demokrasi Desa**, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014, hlm 41

secara langsung pada wilayah desa Margosuko diberbagai dusun yang ada di desa Margosuko tentang bagaimana cara penyampaian aspirasi di desa tersebut yang di ambil sample dari perdusun yang akan diuraikan dengan tabel berikut:

Tabel 4.3

Cara Penyampaian Aspirasi Masyarakat Desa Margosuko

No	Nama Dusun	Cara Penyampaian Aspirasi	Keterangan
1	Sruki	penyampaian secara langsung melalui ketua RT yang ada di dusun sruki	Tidak tentu Dilakukan jika ada yang menyampaikan
2	Jegong	penyampaian secara langsung melalui Kepala Dusun Jegong	Tidak tentu Dilakukan jika ada yang menyampaikan
3	Kandang	penyampaian secara langsung melalui majelis di dusun Kandang	Tidak tentu Dilakukan jika ada yang menyampaikan
4	Mamer	penyampaian secara langsung melalui Kepala Desa	Tidak tentu Dilakukan jika ada yang mengalami permasalahan

Sumber: Data Primer, Desa Margosuko diolah pada tahun 2018

Berdasarkan dari keterangan yang sudah di cantumkan dalam tabel diatas peneliti akan menganalisis satu-persatu setiap dusun mengenai cara penyampaian aspirasi masyarakat yang kurang efektif dan terlaksana kurang maksimal kepada BPD adalah sebagai berikut:

1. Dusun sruki

Dusun sruki didalam penyaluran aspirasi untuk masyarakat yang ada di dusun tersebut dilakukan secara langsung kepada ketua RT yang ada di dusun sruki, yang di sampaikan setiap ada beberapa masukan dari beberapa masyarakat yang hanya mengerti tugas dan fungsi tentang BPD dan mempunyai usulan terkait masalah pembangunan untuk kesejahteraan rakyat, di sampaikan secara lisan kepada ketua rt yang akan di sampaikan kepada anggota BDP seketika bertemu dengan anggota BPD di jalan, di warung atau ketika bertemu di tempat kerja. Maka kesimpulan tentang cara penyampain yang di sampaikan oleh beberapa masyarakat dan disampaikan melalui ketua RT saja yang ada di dusun tersebut di rasa kurang efektif untuk mewakili aspirasi masyarakat yang ada di dusun tersebut dan peran BPD kurang terlihat untuk penampungan dan penyaluran aspirasi di dusun ini.

2. Dusun Jegong

Dusun Jegong didalam penyaluran aspirasi untuk masyarakat yang ada di dusun tersebut dilakukan secara langsung kepada Kepala Dusun yang ada di dusun Jegong, yang di sampaikan setiap ada

beberapa masukan dari satu atau dua dari masyarakat yang mengerti fungsi tentang BPD dan mempunyai usulan terkait masalah pembangunan untuk kesejahteraan rakyat, di sampaikan secara lisan kepada Kepala Dusun yang akan di sampaikan kepada anggota BDP seketika bertemu dengan anggota BPD di Kantor Desa. Maka penyampaian ini kurang efektif karena BPD tidak langsung terjun ke masyarakat melalui pendekatan dengan masyarakat sekitar.

3. Dusun Kandang

Dusun Kandang didalam penyaluran aspirasi untuk masyarakat yang ada di dusun tersebut dilakukan secara langsung sewaktu saat acara jama'ah tahlil/pengajian yang diikuti oleh beberapa anggota BPD yang ada di dusun Kandang, dilakukan setelah selesai acara tahlil/pengajian rutin bulanan, dan itu hanya di sampaikan melalui lisan ketika berbincang-bincang secara non formal mengenai masukan pembangunan sarana prasarana untuk kesejahteraan masyarakat.

4. Dusun Mamer

Dusun Mamer didalam penyaluran aspirasi untuk masyarakat yang ada di dusun tersebut dilakukan secara langsung kepada Kepala Desa ketika ada masukan masalah pembangunan sarana prasarana untuk kesejahteraan masyarakat. Karena masyarakat dusun Mamer banyak yang tidak tau bagaimana cara menyalurkan aspirasi atau saran yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat dan bahkan masyarakat dusun tidak tau siapa saja anggota BPD untuk apa BPD bertugas dan

fungsi-fungsinya. Bahwasanya dengan kejadian ini menggambarkan kalau di dusun ini masyarakat tidak tau akan tugas dan fungsi BPD tersebut.

Berdasarkan analisis diatas dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan Pasal 11 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Margosuko masih kurang efektif dengan adanya faktor-faktor tentang cara peraturan penyampaian dan penampungan sebagai berikut :

- a. Penyampaian dan penampungan aspirasi yang tidak terkoordinir oleh BPD
- b. Penyampaian dan Penampungan aspirasi yang tidak terjadwal dan tidak teratur oleh BPD

meskipun beberapa dari masyarakat sudah menerapkan ketentuan dari pasal tersebut dan BPD sudah melakukan penampungan serta menjalankan penyampaian aspirasi dengan cara lisan. Tetapi setelah peneliti melakukan penelitian lebih lanjut, bahwa kurang efektifnya cara yang di gunakan oleh masyarakat dan ternyata masih banyak dari aspirasi masyarakat desa Margosuko yang tidak tertampung oleh anggota BPD dengan baik dan sebagaimana mestinya. Selanjutnya peneliti menganalisis mengenai faktor yang kedua yaitu faktor perangkat desa.

2. Faktor Perangkat Desa

Perangkat Desa yang di maksud dalam penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa. Anggota BPD sebagai salah satu wakil dari suara

rakyat yang di tetapkan dengan musyawarah mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, tokoh perempuan, kelompok kelembagaan lokal atau pemuka masyarakat lainnya.¹⁰ Maka dari itu perangkat desa harus mampu menjadi sebagai panutan dan menjalankan peranan yang baik serta di terima oleh masyarakat. Untuk itu golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat, golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.¹¹

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang mengatur jumlah anggota BPD di tetapkan dengan jumlah gasal, yaitu paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang dengan memperhatikan jumlah wilayah, penduduk dan kemampuan keuangan milik desa. Maka untuk lebih jelas dan lengkapnya tentang persyaratan pembentukan anggota BPD yang telah tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang berbunyi :

1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa yaitu merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
2. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji.
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa jabatan keanggotaan paling

¹⁰W. Riawan Tjandra dan Ninik Handayani, **Badan Permusyawaratan Desa Dalam Demokrasi Desa**, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014, hlm 12

¹¹Soerjono Soekanto, **Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012 ,hlm 34

banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.¹²

Peneliti telah melakukan penelitian secara langsung di lapangan kepada anggota BPD dan menganalisis tentang kinerja BPD di desa Margosuko, bahwasanya keaktifan dan keserasian anggota BPD masih kurang yang berasal dari faktor :

a. Sumberdaya Manusia

Dapat dikatakan sumber daya manusia yang ada di desa Margosuko untuk anggota BPD sangat rendah karena yang melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang Strata S1 hanya dari ketua BPD saja, yang lain hanya berpendidikan Sekolah Menengah Pertama dan 2 yang lain hanya sampai Sekolah Menengah Atas. Seiring perkembangan zaman yang lebih modern menuju ke zaman milenials seperti saat ini dengan latar belakang SMP kurang dan tidak cukup untuk memenuhi tuntutan untuk melaksanakan ketentuan dari pasal 11 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang harus memikirkan tentang bagaimana cara menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat agar masyarakat merasa terayomi.

b. Kedisiplinan dan Kegairahan

Disiplin dan gairah anggota BPD yang sangat terbatas untuk memikirkan perkembangan desa untuk masa depan. Peneliti telah melakukan wawancara dengan ketua BPD desa Margosuko pada

¹²Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

intinya peneliti menanyakan tentang bagaimana untuk perkembangan desa dimasa depan kepada Bapak Heryanto S.P.D.I, beliau menjelaskan “untuk rencana program BPD dimasa depan untuk saat ini belum terpikirkan,karena kita juga masih banyak pikiran tentang perekonomian sendiri yaitu kerja untuk menafkahi keluarga, kalau untuk BPD biar berjalan dulu sendiri-sendiri dengan aktifitas seadanya dan seperti biasa saja mas”¹³ Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan Ketua BPD dalam hal menata dan merencanakan program untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa Margosuko masih sangatlah kurang.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor pendukung untuk kinerja BPD, tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut tidak mungkin kinerja BPD akan berjalan dengan sesuai harapan, yang di maksud sarana atau fasilitas di sini adalah:

- a. ruang kerja BPD
- b. tenaga kerja BPD
- c. peralatan kerja BPD

Setelah peneliti melakukan penelitian untuk melihat situasi dan kondisi ruang kerja dan faktor-faktor untuk kerja didalam penyaluran dan penampungan aspirasi, bahwasaya ruang dan peralatan serta tenaga kerja BPD sangatlah kurang memadai.

¹³Hasil wawancara dengan Ketua BPD Bapak Heryanto S.pd.I, pada hari Selasa, 3 juli 2018 pukul 18.30 WIB

4. Faktor Masyarakat / Kebudayaan

Perangkat desa yang ada di Desa Margosuko berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan di dalam masyarakat desa. Oleh sebab itu, dapat dilihat dari sudut tertentu sebenarnya masyarakat dapat mempengaruhi perangkat desa Margosuko. Dalam hal ini diambil secara garis besar untuk perihal pendapat-pendapat dari masyarakat mengenai produk hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Bahwa hal ini pasti berkaitan dan berhubungan dengan faktor-faktor terdahulu dari faktor peraturannya, perangkat desa, sarana atau fasilitas. Maka faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat/kebudayaan¹⁴ yaitu :

a. Masyarakat tidak mengerti peran maupun tugas dan fungsi BPD

Peneliti melakukan cara yang sama yaitu melakukan wawancara kepada Bapak Kosmen di Dusun Mamer, beliau menjelaskan “ saya pribadi tau bahwa BPD itu ada di desa, tetapi tidak pernah tau untuk apa BPD dan hanya sebatas mengerti bahwa BPD adalah bagian dari Perangkat desa saja”.¹⁵

Selanjutnya wawancara yang di lakukan kepada Ibu yuliawati di Dusun Jegong ,beliau menjelaskan “BPD agar lebih memperbaiki cara kerja yang ada di desa ini, karena kerja BPD di Desa Margosuko bersifat tertutup dan pasif, kebanyakan dari warga tidak tau untuk apa BPD dan saya juga tidak tau fungsi BPD itu sendiri”.¹⁶

¹⁴Soerjono Soekanto, **Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 45

¹⁵Hasil wawancara Bapak Kosmen, selaku warga di Dusun Mamer Desa Margosuko, Pada hari rabu 27 juni 2018

¹⁶Hasil wawancara Ibu Yuliawati, selaku warga di Dusun Jegong Desa Margosuko, Pada hari rabu 27 juni 2018

Kemudian wawancara yang terakhir kepada Bapak Purnomo di Dusun Kandang ,beliau menjelaskan “BPD agar selalu terjun kemasyarakat secara langsung dan harus sering mengadakan rapat atau sering muncul di dalam kegiatan, agar kita semua paham tentang tugas dan fungsi BPD sebenarnya untuk apa”.¹⁷

b. Masyarakat hanya mengandalkan perangkat dan sesepuh desa

Maka untuk faktor dari permasalahan ini dapat di buktikan dari hasil wawancara kepada dengan Bapak Rianto di Dusun sruki, beliau menjelaskan “kalau BPD saya tahu, tetapi kalau untuk masalah pembangunan saya ikut sama keputusan perangkat desa dan sesepuh desa saja”¹⁸

Kemudian wawancara dengan Bapak Slamet di Dusun Kandang beliau menjelaskan “selama ini saya tau kalau di desa ada BPD tapi belum Pernah melihat BPD menyampaikan sesuatu ke masyarakat masalah pembangunan dan lain lain, kalau saya ikut saja apa kata para tokoh desa dan perangkat desa pasti akan memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan warga, walau terkadang tidak sesuai dengan keinginan rakyat.”¹⁹

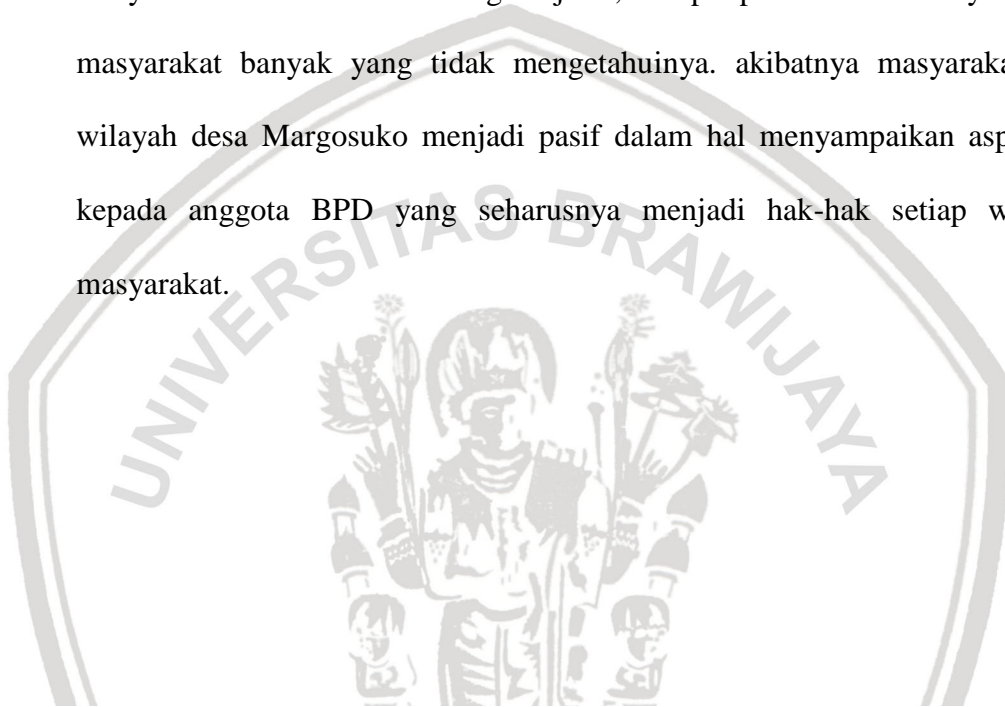
Berdasarkan dari hasil penelitian maupun wawancara secara langsung yang diberikan oleh peneliti kepada masyarakat di desa Margosuko dapat

¹⁷Hasil wawancara Bapak Purnomo, selaku warga di Dusun Kandang Desa Margosuko, Pada hari kamis 28 juni 2018

¹⁸Hasil wawancara Bapak Rianto, selaku warga di Dusun Sruki Desa Margosuko, Pada hari senin 25 juni 2018

¹⁹Hasil wawancara Bapak Slamet, selaku warga di Dusun Kandang Desa Margosuko, Pada hari selasa 26 juni 2018

dikatakan bahwa masyarakat di desa Margosuko banyak yang tidak mengetahui tentang hak-hak mereka untuk menyalurkan aspirasinya kepada anggota BPD padahal di dalam Pasal 11 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa mengenai fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sudah diatur dengan jelas, tetapi pada keadaan nyatanya masyarakat banyak yang tidak mengetahuinya. akibatnya masyarakat di wilayah desa Margosuko menjadi pasif dalam hal menyampaikan aspirasi kepada anggota BPD yang seharusnya menjadi hak-hak setiap warga masyarakat.



C. Kendala dan Upaya Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengimplementasikan Pasal 11 Huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan analisis tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengimplementasikan Pasal 11 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Peneliti dapat menarik beberapa kendala yang dihadapi oleh anggota BPD dalam melaksanakan ketentuan dari Pasal 11 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Untuk kendala yang dihadapi oleh anggota BPD akan dijelaskan lebih lanjut oleh peneliti sehingga dapat dianalisis tentang apa saja kendalanya dan kemudian menganalisis mengenai bagaimana solusi mengatasi kendala dalam pelaksanaannya tersebut.

Berdasarkan hasil analisis pada rumusan masalah yang pertama mengenai bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengimplementasikan Pasal 11 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Maka peneliti dapat menyimpulkan tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Kendala Dari Faktor Peraturannya

Berdasarkan data dari penelitian secara langsung yang dilakukan dengan cara terjun dilapangan mengenai bagaimana BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dapat disimpulkan bahwa banyak yang tidak tercapainya pelaksanaannya dikarenakan banyak masyarakat di wilayah desa Margosuko tidak mengetahui apa itu BPD serta tugas dan fungsi dari BPD tersebut.

Maka kendala yang di hadapi dari faktor peraturan ini dikarenakan kurang adanya sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa kepada masyarakat desa, padahal di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016. Salah satunya terdapat hak-hak dari masyarakat mengenai bagaimana penyaluran aspirasi yang seharusnya di tampung dan disalurkan oleh BPD untuk kemajuan dari desa Margosuko.

Dalam membuktikan apakah benar tentang faktor kendalanya adalah kurangnya sosialisasi anggota BPD kepada masyarakat, Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa masyarakat yang diambil sample dari perdusun yaitu :

- a) Dusun Sruki, kepada Bapak Kabul menjelaskan “selama ini belum pernah ada sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sehingga kami tidak pernah mengetahui tentang bunyi pasal yang menjelaskan fungsi dari BPD tersebut.”²⁰

²⁰Hasil wawancara dengan Bapak Kabul, pada hari Senin, 2 juli 2018 pukul 16.40 WIB

- b) Dusun Mamer kepada Bapak Borno menjelaskan “sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sudah pernah dilakukan tetapi hanya kumpul rapat yang dihadiri ketua RT saja belum pernah dengar /tau kalo ada yang diadakan untuk masyarakat yang lainnya.”²¹
- c) Dusun Jegong kepada Saudara Warmu salah satu anggota linmas yang ada di desa Margosuko menyampaikan” waduh sepertinya tidak pernah adanya sosialisasi peraturan daerah mengenai hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada BPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, bahkan kita sering mengadukan aspirasi/masalah kepada pamong desa atau langsung ke pemerintah desa”²²
- d) Dusun Kandang kepada Bapak Purnomo mengatakan “ mas yang saya tau sosialisai tidak ada karena dari faktor anggota BPD sendiri pun kurang kompak dan jarang terlihat dalam suatu kegiatan, bahkan saya pernah mendengar bahwa anggota BPD saja kurang akur mungkin ada permasalahan internal antar BPD itu sendiri ya mas”.²³

Berdasarkan hasil dari analisis yang telah didapat dari hasil wawancara dan sudah di cantumkan di atas dapat di simpulkan bahwa sosialisasi Peraturan

²¹Hasil wawancara dengan ketua Rt Bapak Burno, pada hari Senin, 2 juli 2018 pukul 13.15 WIB

²²Hasil wawancara dengan anggota Linmas Saudara Warmu, pada hari Senin, 2 juli 2018 pukul 16.30 WIB

²³Hasil wawancara dengan sesepuh warga dusun Kandang Bapak Purnomo, pada hari Senin, 2 juli 2018 pukul 19.10 WIB

Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sangat kurang. Karena belum semua masyarakat mengetahui tugas dan fungsi dari BPD yang seharusnya menjadi wakil dari suara rakyat kepada pemerintah desa. Selanjutnya peneliti menganalisis mengenai kendala dari faktor perangkat desa.

2. Kendala Dari Faktor Perangkat Desa

Berdasarkan penelitian secara langsung yang dilakukan di lapangan kendala yang dihadapi BPD di desa Margosuko adanya permasalahan internal oleh anggota BPD yang berpengaruh terhadap peran BPD kepada masyarakat seperti yang dapat disimpulkan dengan permasalahan :

1. Masih belum adanya kesepahaman serta kekompakan dalam mengutarakan/menjalankan pendapat dan pemikiran antara Ketua BPD dan anggota BPD, dari kendala ini dapat menghambat jalannya peranan BPD sebagai wakil suara rakyat, dikarenakan banyak yang belum terealisasi dan tersosialisasikan aspirasi dari masyarakat. Bahkan untuk tugas dan fungsi BPD di Desa Margosuko masih berjalan seadanya dari tahun ke tahun yang terlihat pasif, sehingga masyarakat masih banyak yang belum terlalu paham tentang tugas dan fungsi BPD, bahkan banyak dari masyarakat yang belum tau siapa saja anggota BPD serta sebagai apa peranannya dalam suatu desa untuk masyarakat.²⁴

²⁴Hasil Wawancara Kasturi Anggota Badan Permusyawaratan Margosuko, 18 Juni 2018

2. Masih belum adanya pertemuan yang di lakukan secara rutin oleh anggota BPD di dalam membahas tugas dan fungsi sebagai BPD untuk kepentingan penyaluran dan penampungan aspirasi yang di berikan oleh masyarakat. Dalam arti bahwa anggota BPD tidak pernah mengadakan kegiatan rapat mingguan atau bulanan untuk anggota BPD sendiri dan hanya mengandalkan rapat yang hanya di selenggarakan oleh Pemerintah Desa.²⁵ Hal ini dapat di buktikan setelah penulis menanyakan notulensi kegiatan rapat rutin yang di lakukan oleh BPD, namun pada hasilnya bahwa notulensi yang di tanyakan tidak ada, hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa BPD tidak pernah mengadakan rapat koordinasi antar anggota BPD.

3. Kendala Dari Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas untuk BPD, tidak akan mungkin BPD dapat menjalankan dan menyeraskan peranan sebagai salah satu tugas dan fungsi BPD kepada masyarakat. Maka kendala yang di hadapi BPD dari faktor sarana/fasilitas akan di jelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4

Unsur Sarana atau Fasilitas BPD

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Ruang Kerja	Sudah Tidak layak
2	Komputer	Tidak Ada
3	Kelengkapan ATK	Kurang lengkap

²⁵Hasil Wawancara Suyanto Sekretaris Badan Permusyawaratan Margosuko, 17 Juni 2018

4	Kursi ruangan	Sudah Rusak
5	Kotak Saran / Aspirasi	Tidak Ada
6	Papan Pengumuman	Sudah Rusak
7	Jadwal Piket Kerja	Tidak Ada

Sumber: Data primer, diolah pada tahun 2018

Berdasarkan penelitian secara langsung dilapangan fasilitas yang dimiliki anggota BPD di desa Margosuko masih kurang memadai, dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwasanya anggota BPD tidak memiliki sarana fasilitas yang memadai. Padahal fasilitas atau sarana tersebut sangat penting untuk menunjang kegiatan BPD dalam mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat atau mengadakan rapat dengan masyarakat. Dengan fasilitas yg tidak memadai maka kegiatan yang dilakukan BPD juga tidak akan terlaksana secara efektif.

4. Kendala Dari Faktor Masyarakat dan Kebudayaan

Berdasarkan penelitian langsung yang di lakukan di lapangan bahwasnya untuk kesimpulan kendala dari faktor masyarakat atau kebudayaan adalah :

- a) Masyarakat tidak peduli atau terlalu acuh terhadap keberadaan BPD dan menganggap BPD tidak mempunyai pengaruh besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
- b) Masyarakat hanya mengikuti budaya terdahulu yaitu patuh pada tokoh desa, para sesepuh desa sehingga tidak memanfaatkan hak tentang penyaluran aspirasi mereka.

Maka hasil penelitian yang di lakukan secara langsung dilapangan dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat desa Margosuko dalam hal menyalurkan aspirasi kepada BPD masih kurang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak peduli dan kurang mengerti bagaimana cara penyaluran aspirasi kepada BPD ditambah masyarakat desa yang terlalu pasif untuk menyampaikan aspirasinya, kebanyakan masyarakat desa masih canggung untuk mengutarakan aspirasinya di sebabkan oleh sebagian warga yang belum terlalu dekat dengan warga lain dan belum terbiasa mengutarakan aspirasi di khalayak lain.

Kendala yang berasal dari faktor kebudayaan yaitu budaya yang terikat oleh Para Tokoh desa dan Para Sesepuh. Karena sebagian warga masyarakat di desa Margosuko hanya mengikuti Tokoh desa dan Para Sesepuh terkait dengan permasalahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, tetapi pada kenyataannya ketika terjadi sesuatu ketidak sesuaian di dalam pembangunan, dan pengambilan keputusan dengan apa yang di kehendaki oleh masyarakat desa, maka pada saat itulah masyarakat baru akan menuntut haknya dalam memberikan aspirasinya.

Selanjutnya peneliti akan menganalisis mengenai upaya dari beberapa kendala yang dihadapi BPD dalam pelaksanaan Pasal 11 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Upaya dari Faktor Peraturannya

Berdasarkan penelitian diatas sudah dijelaskan bahwa kendala dari faktor peraturannya ini adalah dikarenakan kurangnya sosialisasi oleh BPD untuk peraturan yang mengatur tentang tugas dan fungsi dari BPD yang ada di Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Ketua dan anggota BPD yang ada di desa Margosuko. Maka dari itu untuk dapat menganalisis upaya apa saja yang harus dilakukan BPD agar Peraturan Daerah Kabupaten Tentang BPD dapat di ketahui dan dipahami oleh masyarakat desa Margosuko. Upaya yang di ungkapkan oleh anggota BPD adalah “Akan mensosialisasikan keseluruhan masyarakat desa Margosuko mengenai peraturan yang mengatur tentang tugas dan fungsi dari BPD terutama dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan cara mensosialisasikanya di setiap dusun mulai dari Dusun Sruki, Jegong, Kandang, Mamer dan mengadakan pertemuan dengan warga di setiap RT serta memberikan pemahaman yang lebih tentang tugas dan fungsi BPD sebagai wakil rakyat kepada Kepala Dusun dan Ketua RT yang ada di desa Margosuko.”

2. Upaya dari Faktor Perangkat Desa

Berdasarkan analisis diatas mengenai kendala yang dihadapi dalam kinerja BPD dari faktor perangkat desa dalam pelaksanaan Pasal 11 Huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Kendala ini terletak dari faktor sumberdaya manusia

yang kurang berkualitas, kedisiplinan dan kegairahan serta partisipasi BPD untuk memikirkan pentingnya aspirasi rakyat demi kesejahteraan masyarakat.

Atas dasar itu peneliti melakukan penelitian secara langsung kepada anggota BPD di desa Margosuko untuk menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan BPD untuk mengatasi kendala dari faktor perangkat desa dan harus mengambil langkah sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah :²⁶

- a) Memberikan pelatihan khusus kepada anggota BPD dan melakukan perbandingan program dengan desa lain serta melakukan evaluasi kerja BPD.
- b) Harus ada sikap yang terbuka terhadap sesama anggota BPD didalam pengalaman maupun penemuan ilmu baru
- c) Agar lebih bisa menerima keadaan individu anggota BPD dan senantiasa menerima segala kelebihan dan kekurangan anggota BPD
- d) Lebih meningkatkan koordinasi pertemuan antar anggota untuk meningkatkan kekompakan dalam organisasi dan memberikan evaluasi jalannya pemerintah desa dalam mengatur pemerintahan desa Margosuko.

3. Upaya dari Faktor Sarana atau Fasilitas

Berdasarkan analisis diatas dapat kita lihat bahwa kendala dari faktor sarana atau fasilitas yang dihadapi anggota BPD di desa Margosuko secara umum adalah kurang lengkapnya sarana dan fasilitas yang di gunakan sebagai

²⁶Hasil wawancara dengan Ketua BPD Bapak Heryanto S.pd.I, pada hari Selasa, 3 juli 2018 pukul 18.30 WIB

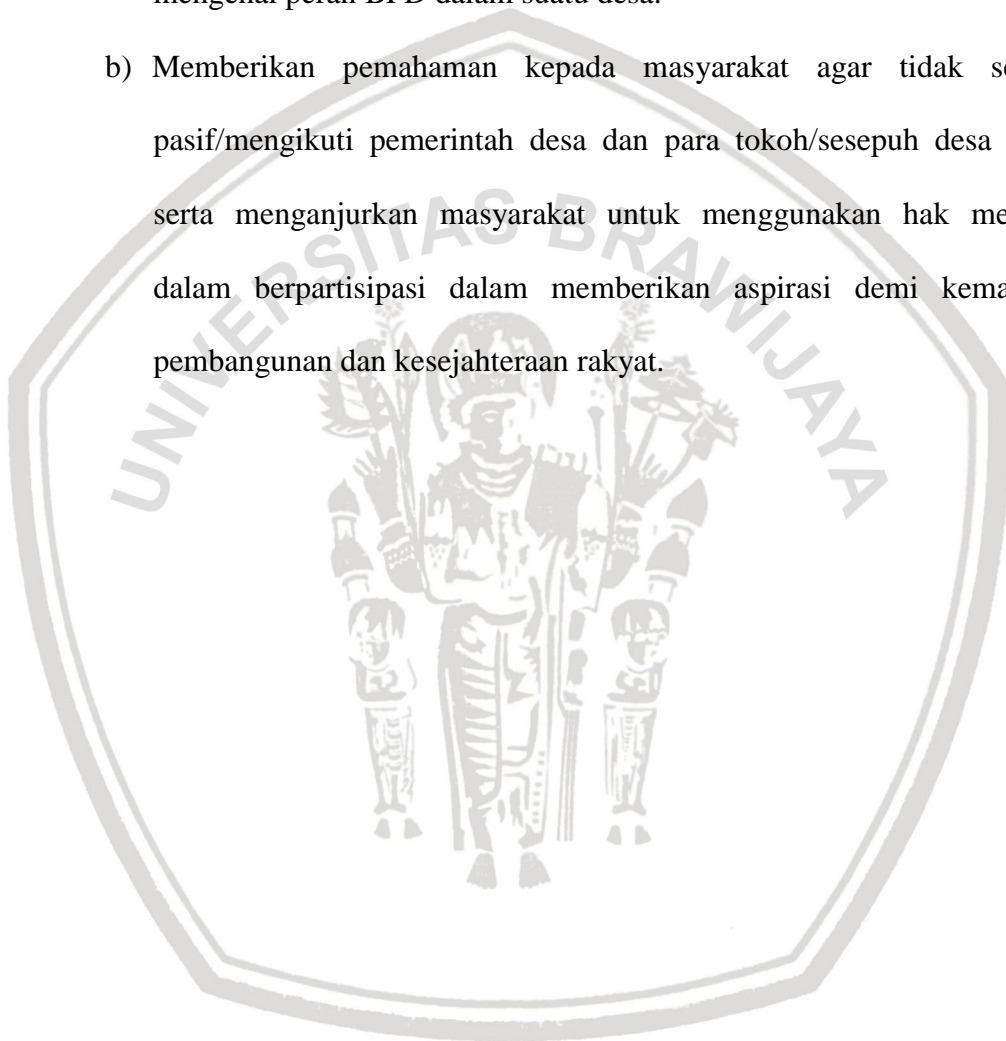
faktor pendukung atau sebagai alat bantu untuk peran BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Maka upaya yang harus dilakukan oleh BPD desa Margosuko setelah peneliti melakukan wawancara langsung kepada anggota BPD tersebut dengan hasil wawancara :

- a) Akan mengusulkan kepada kepala desa untuk perbaikan ruang kerja BPD dan melengkapi semua perlengkapan yang di butuhkan untuk kerja BPD
- b) Membuat jadwal piket kerja anggota BPD
- c) Melakukan perbaikan dan melengkapi keperluan ATK yang di butuhkan oleh BPD”.
- d) Melengkapi sarana penampungan aspirasi berupa kotak saran/aspirasi, papan pengumuman dan pendukung yang lain.

4. Upaya dari Faktor Masyarakat dan Kebudayaan

Berdasarkan analisis yang dapat di ambil dari kesimpulan permasalahan di atas bahwasanya kendala dari faktor masyarakat dan kebudayaan yang dihadapi oleh anggota BPD secara umum adalah kebanyakan dari masyarakat tidak tau tugas dan fungsi BPD serta di tambahna masyarakat yang cenderung pasif dan selalu menunggu keputusan dari kepala desa, pamong desa, para sesepuh desa serta keputusan BPD saja maka upaya yang di ambil untuk memperbaiki nilai aktif masyarakat bahwa yang diusulkan dari kepala desa kepada BPD yaitu:

- a) akan mengadakan paguyuban dari lingkup terkecil yang berasal dari lingkup RT/RW perdesun yang di adakan oleh desa dan akan di agendakan musyawarah 1 bulan sekali yang di hadiri oleh anggota BPD serta melakukan pendekatan sosiologis kepada masyarakat dengan tujuan agar BPD dan masyarakat lebih peduli dan lebih mengenal peran BPD dalam suatu desa.
- b) Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak selalu pasif/mengikuti pemerintah desa dan para tokoh/sesepuh desa saja, serta menganjurkan masyarakat untuk menggunakan hak mereka dalam berpartisipasi dalam memberikan aspirasi demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas peneliti menyimpulkan:

1. Peran BPD dalam mengimplementasikan Pasal 11 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa yang berbunyi: ”menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa” di Desa Margosuko Kabupaten Tuban belum maksimal yang dapat di lihat dari faktor peraturanya, perangkat desa, sarana/fasilitas, faktor masyarakat dan budaya, di sebabkan adanya beberapa kendala yang menyebabkan kurang maksimalnya peran BPD tersebut.
2. Kendala yang menyebabkan tidak maksimalnya peran BPD dalam menjalankan tugas fungsinya yang di sebabkan dari kurangnya sosialisasi pada masyarakat dan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap isi Pasal 11 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, di tambah dengan sarana dan fasilitas yang tidak memadai, kemudian masyarakat yang terlalu pasif dalam menyampaikan aspirasi kepada BPD karena lebih memilih mengikuti peranan dari tokoh desa/sesepuh desa.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan daerah

yang mengatur BPD agar masyarakat mengetahui dan memahami tentang tugas dan fungsi BPD, mengadakan pelatihan khusus kepada anggota BPD dengan cara melakukan perbandingan program desa dengan desa yang lain dan melakukan evaluasi kerja BPD, memperbaiki dan melengkapi sarana fasilitas untuk menunjang kegiatan BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Desa Margosuko, yaitu:

1. Menambahkan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas serta penempatan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang lebih baik agar Badan Permusyawaratan Desa mampu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil dari suara rakyat
2. Pengadaan dan penambahan biaya kesejahteraan yang cukup dari Pemerintah Desa sebagai wujud sarana dan fasilitas yang memadai untuk Badan Permusyawaratan Desa
3. Diharapkan untuk anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat melaksanakan musyawarah rutin yang dilakukan di setiap bulan perdusun. Hal ini bertujuan mengoptimalkan musyawarah antar dusun

di setiap kegiatan, agar terjalin komunikasi yang baik antara BPD dan masyarakat, sehingga tercipta partisipasi yang baik

4. Diharapkan masyarakat menyadari dan ikut berpartisipasi agar sesuai dengan isi Pasal 11 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa hak masyarakat untuk dapat mengutarakan/menyampaikan aspirasinya kepada BPD



DAFTAR PUSTAKA

REFERENSI BUKU

Azam Awang, **Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Adon Nasrullah Jamaludin, **Sosiologi Perdesaan**, Pustaka Setia, Bandung, 2015

Burhan Ashofia, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta, 2012

Hadari Nawawi, **Metode Penelitian Bidang Sosial**. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2012

Imam Koeswahyono, dkk., **Sosiologi Legal Bekal Pengantar Dan Subtansi Pedalaman**, Intimedia, Malang, 2014

Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine S.T. Kansil, **Sistem Pemerintahan Indonesia**, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2011

Mashuri Mashab, **Politik Pemerintah Desa Di Indonesia**, Cetakan 1 Polgov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013

Nurholis Hanif, **Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa**, Erlangga, Jakarta, 2011

Ni'matul Huda, **Hukum Pemerintah Desa**, Setara pers, Malang, 2015

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2006

Rustiadi dan Pranoto, **Agropolitan: Membangun Ekonomi Pedesaan**, Crestpent Pres, Bogor, 2007, Hlm33 ; ; di dalam buku Adon Nasrullah jamaludin, **Sosiologi Pedesaan**, Pustaka setia, Bandung, 2015

Rahardjo, **Pengantar Sosiologi Pedesaan Dan Sosiologi Pertanian**, UGM press, Yogyakarta, 1999, Hlm 28; di dalam buku Adon Nasrullah jamaludin, **Sosiologi Pedesaan**, Pustaka setia, Bandung, 2015

Soerjono Soekanto, **Pengantar penelitian Hukum**, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2010

Soerjono Soekanto, **Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012

Sutoro Eko yang dikutip oleh Ni'matulHuda, **Hukum pemerintah Desa**, Setara Press, Malang, 2015

W. Riawan Tjandra dan Ninik Handayani, **Badan Permusyawaratan Desa Dalam Demokrasi Desa**, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014

REFERENSI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan desa

REFERENSI INTERNET

<http://www.margosuko-bancar.desa.id>

